



Katalog: 1202059.3403

LAPORAN KINERJA BPS Kabupaten Gunungkidul 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LAPORAN KINERJA BPS Kabupaten Gunungkidul 2019

<https://gunungkidulkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul 2019

ISBN:

No. Publikasi: 34030.2002

Katalog BPS: 1202059.3403

Ukuran Buku: 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv + 92 halaman

Naskah:

Tim SAKIP BPS Kabupaten Gunungkidul

Penyunting:

Tim SAKIP BPS Kabupaten Gunungkidul

Desain Cover oleh:

Tim SAKIP BPS Kabupaten Gunungkidul

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Gunungkidul

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penulis



Pengarah : Drs. Sumarwiyanto
Koordinator : Retno Widiyanti, S.ST.
Penyusun : Tim SAKIP BPS Kabupaten Gunungkidul
Penyunting : Retno Widiyanti, S.ST.
Gambar Kulit : Tim SAKIP BPS Kabupaten Gunungkidul
Tata Letak dan Infografis : Tim SAKIP BPS Kabupaten Gunungkidul

<https://gunungkidulkab.bps.go.id>

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan bidang statistik.

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina hubungan dan kerjasama dalam bidang statistik dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja ini juga sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2019 dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, disampaikan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa mendatang sangat kami hargai.

Wonosari, 27 Februari 2020

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
Kepala,

Drs. Sumarwiyanto

Daftar Isi



Tim Penulis	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
Ringkasan Eksekutif	3
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Maksud dan Tujuan	8
1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	8
1.4 Landasan Hukum	10
1.5 Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Gunungkidul	11
1.6 Potensi dan Permasalahan	13
1.7 Sistematika Penyajian	15
Bab II Perencanaan Kinerja	
2.1 Rencana Strategis BPS Kabupaten Gunungkidul 2015 -2019	19
2.2 Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019	25
3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul	36
3.3 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul Terhadap Renstra 2015 – 2019	37
3.4 Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Gunungkidul tahun 2019	39
3.4.1 Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan 2019	39
3.4.2 Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) 2019	44
3.4.3 Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik(Wilkerstat) Sensus Penduduk 2020	47
3.4.4 Survei Wisatawan Nusantara Tahun 2019	61
3.4.5 Survei Disagregasi PMTB Tahun 2019	64
3.5 Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019	68
3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2019	69

Bab IV	Penutup	
4.1	Tinjauan Umum	75
4.2	Tindak Lanjut	75
Lampiran		79

<https://gunungkidulkab.bps.go.id>



Daftar Tabel



Tabel 1.1.	Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Gunungkidul Menurut Jabatan Tahun 2019	12
Tabel 1.2.	Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Gunungkidul Menurut Golongan Tahun 2019	13
Tabel 1.3.	Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Gunungkidul Menurut Usia Tahun 2019	13
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019	21
Tabel 3.1.	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019	26
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik	29
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik	32
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Tujuan: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui Koordinasi dan Pembinaan yang Efektif di Bidang Statistik	34
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel	35
Tabel 3.6.	Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis 2015 - 2019	36
Tabel 3.7.	Capaian Kinerja 2019 terhadap Target Renstra 2015 – 2019	37
Tabel 3.8.	Jadwal Kegiatan Survei Ubinan Tanaman Pangan 2019 Kabupaten Gunungkidul	40
Tabel 3.9.	Target Sampel dan Realisasi Plot Survei Ubinan Tahun 2019 Menurut Jenis Tanaman	43
Tabel 3.10.	Target Sampel dan Realisasi Survei KSA Padi Tahun 2019	46
Tabel 3.11.	Target Sampel dan Realisasi Survei KSA Jagung Tahun 2019	47
Tabel 3.12.	Jadwal Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020	49
Tabel 3.13.	Matrik Kebutuhan Petugas Pemetaan per Kecamatan	51
Tabel 3.14.	Jadwal Wawancara Calon Petugas Pemetaan per Kecamatan	52
Tabel 3.15.	<i>Rundown</i> Pelatihan Petugas Pemetaan Wilkerstat	54
Tabel 3.16.	Jadwal Pelatihan	55
Tabel 3.17.	Hasil Pengolahan SP2020-RD Pemetaan 2019 Kabupaten Gunungkidul per 7 Agustus 2019	58
Tabel 3.18.	Target dan Realisasi Sampel Survei Wisatawan Nusantara Tahun 2019	63
Tabel 3.19.	Target dan Realisasi Pencacahan Survei PMTB Tahun 2019	68
Tabel 3.20.	Realisasi Anggaran Tahun 2019 Menurut Program	70
Tabel 3.21.	Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis	71

Daftar Gambar



Gambar 1.1.	Komposisi SDM BPS Kabupaten Gunungkidul	11
Gambar 1.2.	Distribusi SDM BPS Kabupaten Gunungkidul	11
Gambar 1.3.	FGD Kegiatan Gunungkidul Dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Gunungkidul 2019	14
Gambar 3.1.	Pembukaan dan <i>Try Out</i> Pelatihan Petugas Survei Ubinan	42
Gambar 3.2.	Pelaksanaan Survei Ubinan 2019	42
Gambar 3.3.	Pembukaan Pelatihan Petugas KSA Padi Januari 2018 dan Briefing Petugas KSA Padi Januari 2019	45
Gambar 3.4.	Pelaksanaan Lapangan Kegiatan Pendataan KSA 2019	45
Gambar 3.5.	Tes Wawancara Petugas Pemetaan 2019	53
Gambar 3.6.	Pengumuman Final Calon Petugas via Web	53
Gambar 3.7.	Suasana Kelas Pelatihan Petugas Pemetaan Tahun 2019	56
Gambar 3.8.	Rekonsiliasi Pemetaan 2019 di Kecamatan Nglipar	56
Gambar 3.9.	Monitoring Pemetaan 2019 per Petugas	57
Gambar 3.10.	Peta Kecamatan dan Kabupaten Setelah Digitasi	60
Gambar 3.11.	Suasana Kelas Pelatihan Petugas Survei Wisatawan Nusantara Tahun 2019	62
Gambar 3.12.	Pendataan Survei Wisatawan Nusantara Tahun 2019	63
Gambar 3.13.	Pelatihan Petugas Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2019	66
Gambar 3.14.	Pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019	66

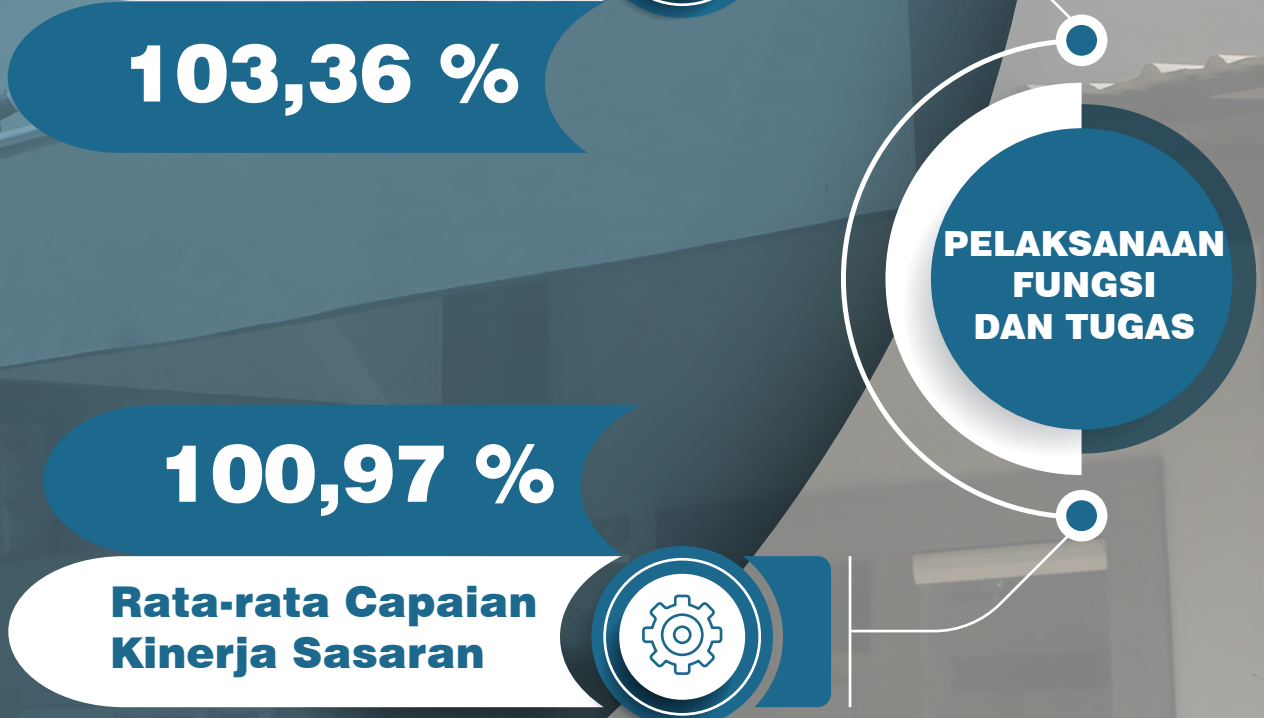
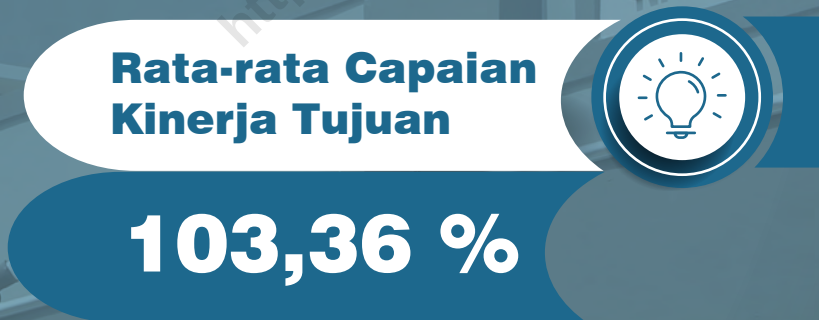
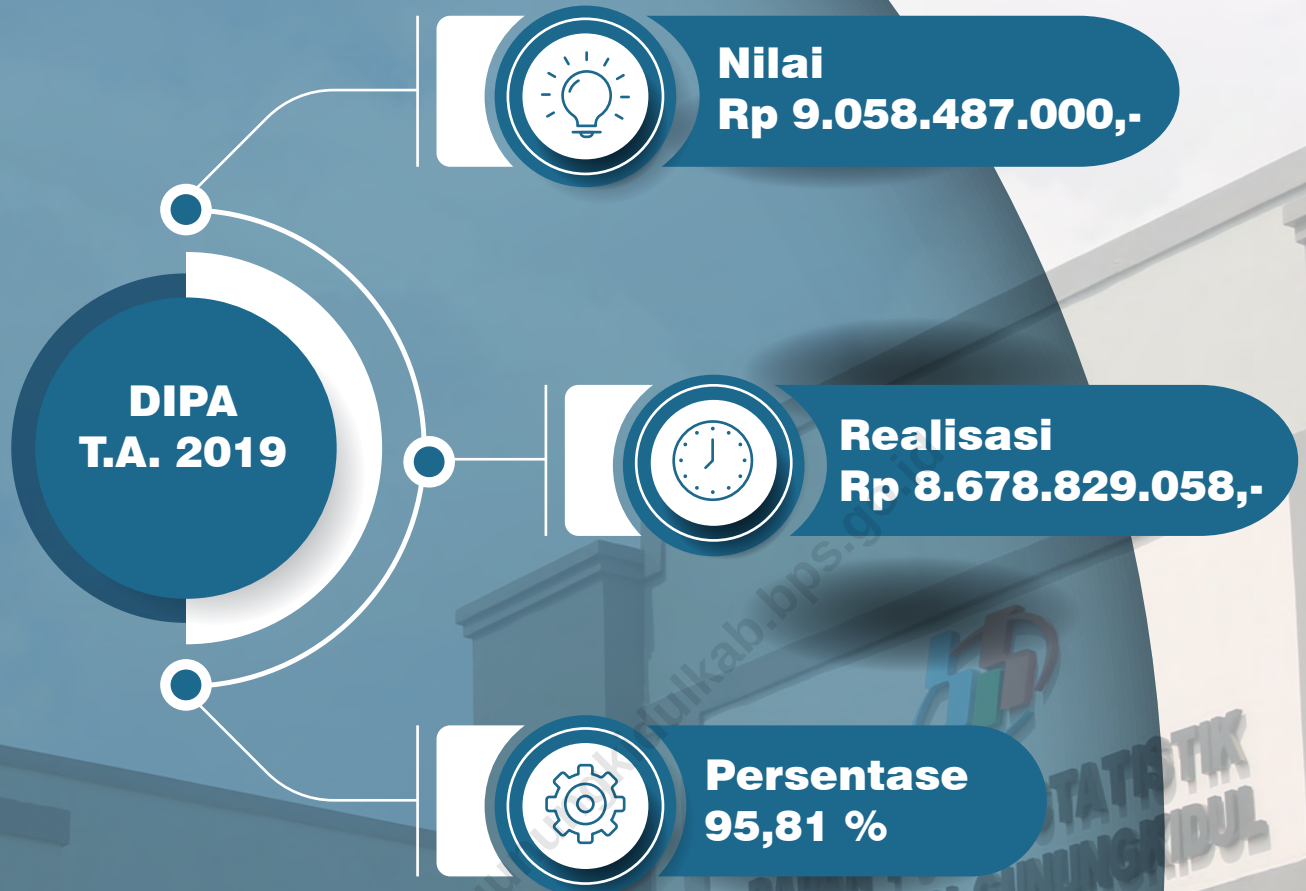
Daftar Lampiran



Lampiran. 1	Struktur Organisasi BPS Kabupaten Gunungkidul	79
Lampiran. 2	Rencana Strategis BPS Kabupaten Gunungkidul	80
Lampiran. 3	Rencana Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul	81
Lampiran. 4	Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul	83
Lampiran. 5	Pengukuran Capaian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul	85
Lampiran. 6	SDM BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019	87
Lampiran. 7	Kegiatan BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019	88
Lampiran. 8	<i>Respon Rate</i> Survei BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019	90
Lampiran. 9	Judul Publikasi BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019	92

<https://gunungkidulkab.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF 2019



Ringkasan Eksekutif



Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Adapun tugas BPS secara umum adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara visi BPS yaitu **“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”** dapat dicapai dengan menerapkan misi BPS secara umum yaitu:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik;
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS Kabupaten Gunungkidul mempunyai 4 (empat) tujuan strategis yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2015-2019 yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas data statistik;
- 2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
- 3) Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan
- 4) Pelaksanaan birokrasi yang akuntabel.

Keempat tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 (lima) sasaran strategis yang seharusnya dicapai oleh BPS Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya, BPS Kabupaten Gunungkidul melaksanakan serangkaian kegiatan yang diwadahi ke dalam sejumlah program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA); dan
3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan ke dalam DIPA BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp 9.058.487.000,-. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2019 adalah sebesar Rp 8.678.829.058,- atau 95,81 persen.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan visi dan misinya, menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS Kabupaten Gunungkidul menunjukkan keberhasilan. Simpulan ini tercermin dari angka rata-rata capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis masing-masing sebesar 103,36 persen dan 100,97 persen. Tingkat capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja strategis ini memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Kabupaten Gunungkidul telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS Kabupaten Gunungkidul dengan baik.



BAB IV REVISI KINERJA

<https://gunungkidulkab.bps.go.id>



BAB I

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul merupakan perwakilan BPS di daerah yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengemban tugas dari pemerintah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan terciptanya Sistem Statistik Nasional (SSN) yang handal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Dalam menyajikan statistik dasar, BPS menyelenggarakan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilakukan secara berkala, terus menerus atau sewaktu-waktu yang periode pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS Republik Indonesia (BPS-RI) dengan memperhatikan kebutuhan data baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, salah satu prasyarat yang harus dipenuhi adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik. Sebagai perwujudan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu sistem akuntabilitas juga dapat dijadikan media untuk menunjukkan capaian pretasi dari lembaga pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 adalah perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Gunungkidul untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul di tahun yang akan datang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban BPS Kabupaten Gunungkidul atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2019.

1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

1. Kedudukan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, kedudukan BPS Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

- (1) BPS Kabupaten Gunungkidul adalah perwakilan BPS di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.
- (2). BPS Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas

BPS Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Gunungkidul;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten Gunungkidul;

- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kabupaten Gunungkidul;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kabupaten Gunungkidul.

4. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, susunan organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul terdiri dari :

- a. Kepala;
Kepala BPS Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas memimpin BPS Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Gunungkidul serta membina aparatur BPS Kabupaten Gunungkidul agar berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Subbagian Tata Usaha;
Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam.
- c. Seksi Statistik Sosial;
Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik sosial.
- d. Seksi Statistik Produksi;
Seksi Statistik Produksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik produksi.
- e. Seksi Statistik Distribusi;
Seksi Statistik Distribusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik distribusi.
- f. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik;
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor.
- g. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik;
Seksi Integrasi dan Pengolahan Statistik mempunyai tugas melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik.

h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Koordinator Statistik Kecamatan

Pada setiap kecamatan diangkat seorang Koordinator Statistik Kecamatan disingkat KSK dengan tugas melaksanakan kegiatan statistik dasar di kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

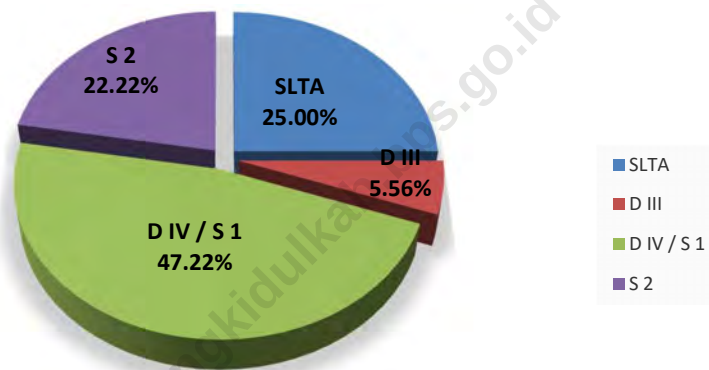
1.4. Landasan Hukum

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPS Kabupaten Gunungkidul dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik.
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 58 Tahun 2014, Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik.

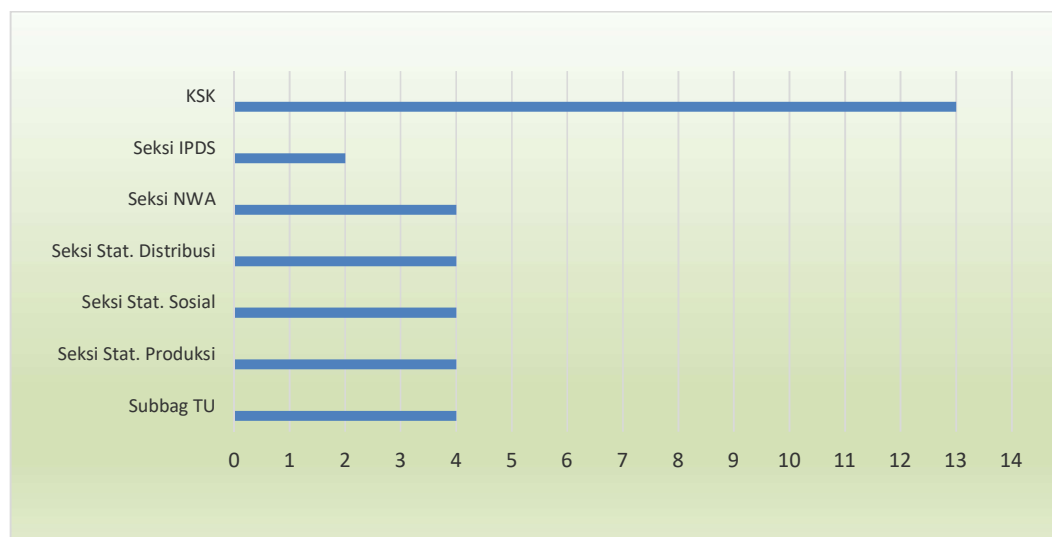
1.5 Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Gunungkidul

Pada akhir tahun 2019, Sumber daya manusia (SDM) BPS Kabupaten Gunungkidul seluruhnya berjumlah 36 pegawai. Kualitas SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Komposisi SDM terbesar dengan tingkat pendidikan D-IV/S1, yaitu mencapai 47,22 persen. Komposisi SDM dengan minimal pendidikan D-IV/S1 mencapai 69,44 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM BPS Kabupaten Gunungkidul cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Gunungkidul. Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah.



Gambar 1.1. Komposisi SDM BPS Kabupaten Gunungkidul

SDM yang cukup baik dari sisi tingkat pendidikan ini juga harus diimbangi dengan pemerataan SDM untuk masing-masing seksi/subbag. Distribusi SDM yang merata untuk masing-masing seksi/subbag diharapkan dapat memperlancar kegiatan BPS Kabupaten Gunungkidul. Distribusi SDM BPS Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Distribusi SDM BPS Kabupaten Gunungkidul

Selain dari sisi pendidikan, peran jabatan fungsional juga semakin ditingkatkan. Tercatat sebanyak 23 pegawai atau 63,89 persen menduduki jabatan fungsional tertentu, sedangkan 6 pegawai atau 16,67 persen menduduki jabatan fungsional umum. Meningkatnya jumlah pegawai BPS kabupaten Gunungkidul yang menduduki jabatan fungsional tertentu sebagai akibat adanya kebijakan inpassing pada tahun 2017 dan 2018. Secara rinci profil pegawai BPS Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Gunungkidul Menurut Jabatan
Tahun 2019

Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Pejabat Struktural	7	19,44
2. Pejabat Fungsional Statistisi		
a) Statistisi Muda	8	22,22
b) Statistisi Pertama	5	13,89
c) Statistisi Penyelia	3	8,33
d) Statistisi Pelaksana Lanjutan	5	13,89
e) Statistisi Pelaksana	2	5,56
3. Pejabat Fungsional Umum	6	16,67
Jumlah	36	100,00

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Gunungkidul Menurut Golongan
Tahun 2019

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)
IV	3	8,33
III	29	80,56
II	4	11,11
Jumlah	36	100,00

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Gunungkidul Menurut Usia Tahun 2019

Usia	Jumlah (orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)
> 50	7	19,44
41-50	10	27,78
31-40	19	52,78
<=30	0	0
Jumlah	36	100,00

1.6 Potensi dan Permasalahan

1) Potensi yang dimiliki

Secara vertikal, BPS Kabupaten Gunungkidul melaksanakan seluruh kegiatan yang diperintahkan BPS RI dan BPS Provinsi D.I. Yogyakarta untuk dilaksanakan di daerah sesuai petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Selain sebagai kepanjangan tangan BPS RI dan BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, juga menjadi rujukan data dan informasi statistik di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, sebagian pihak swasta dan lembaga penelitian telah menggunakan data BPS dalam perencanaan, evaluasi dan riset yang dilakukan. BPS juga telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi BPS untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan di masa sekarang dan masa mendatang.

Selain ditunjang oleh kualitas SDM yang cukup baik, BPS Kabupaten Gunungkidul juga memiliki infrastruktur teknologi informasi yang baik. Perpaduan kedua potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Hal ini sekaligus usaha untuk menjawab tantangan dari pengguna data yang menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat, dapat diperoleh lebih mudah, lebih berkualitas dan lebih murah.



Gambar 1.3.
FGD Kegiatan Gunungkidul Dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Gunungkidul 2019

2) Permasalahan yang dihadapi

Upaya peningkatan kualitas data di BPS Kabupaten Gunungkidul menghadapi beberapa permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan internal yang menonjol adalah terbatasnya SDM statistik yang bertugas di lapangan atau kecamatan. Beberapa kecamatan belum memiliki Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) secara definitif, sehingga pelaksanaan tugas di kecamatan yang bersangkutan dirangkap

oleh KSK dari kecamatan terdekat. Dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, KSK yang definitif sebanyak 13 orang.

Permasalahan eksternal yang cukup menonjol adalah rendahnya kesadaran responden, terutama perusahaan. Kurangnya kesadaran responden untuk memberi jawaban dan merespon pertanyaan dalam kuesioner menyebabkan tingkat pemasukan dokumen (*response rate*) menjadi rendah atau keterlambatan pemasukan dokumen. Lebih dari itu, kurangnya kesadaran responden untuk memberikan data maupun informasi berdasar fakta dan secara lengkap menyebabkan tingkat kesahihan, akurasi dan kelengkapan data yang dihasilkan belum optimal.

Permasalahan yang lain adalah belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Hal ini terjadi karena implementasi otonomi daerah serta terkendala oleh Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Di samping itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS menimbulkan anggapan bahwa BPS adalah sumber dari segala sumber data/informasi.

1.7 Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Kabupaten Gunungkidul; landasan hukum; sumber daya manusia di BPS Kabupaten Gunungkidul, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Kabupaten Gunungkidul; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Gunungkidul 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Gunungkidul 2019.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul 2019, Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Gunungkidul 2019, dan Realisasi Anggaran tahun 2019.

Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB IV REVISI KINERJA

<https://gunungkidulkab.bps.go.id>



BAB II

Perencanaan Kinerja



2.1 Rencana Strategis BPS Kabupaten Gunungkidul 2015- 2019

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2015- 2019, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul dalam menetapkan rencana strategis Tahun 2015 – 2019 mengacu Renstra BPS RI 2015 -2019.

BPS Kabupaten Gunungkidul sebagai kepanjangan tangan BPS RI dan BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, mempunyai tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. BPS Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasi dan kerjasama dalam bidang statistik pada wilayah regional kabupaten dengan dinas/instansi terkait dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional.

Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Gunungkidul adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala regional Kabupaten Gunungkidul yang berlaku selama kurun waktu 2015-2019. Penyusunan Renstra BPS Kabupaten Gunungkidul 2015 -2019 mengacu Renstra BPS RI dan Renstra BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.

1. Visi BPS Kabupaten Gunungkidul :

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”.

2. Misi BPS Kabupaten Gunungkidul :

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kabupaten Gunungkidul yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
- b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.

- c. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut, BPS Kabupaten Gunungkidul mengacu BPS RI mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

3. Tujuan BPS Kabupaten Gunungkidul

- Tujuan 1: Peningkatan kualitas data statistik;
Tujuan 2: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
Tujuan 3: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik;
Tujuan 4: Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

4. Sasaran BPS Kabupaten Gunungkidul

Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BPS Kabupaten Gunungkidul mempunyai empat tujuan yang dicanangkan dalam rencana strategis periode 2015-2019. Tujuan BPS Kabupaten Gunungkidul selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut.

Tujuan 1: Peningkatan kualitas data statistik; sasaran strategis yang ditetapkan yaitu:

- Meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS.

Tujuan 2: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; mempunyai sasaran strategis yaitu:

- Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*).

Tujuan 3: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; mempunyai sasaran strategis yaitu:

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN.

Tujuan 4: Peningkatan birokrasi yang akuntabel; Dijabarkan dalam dua sasaran strategis yaitu:

- Meningkatkan birokrasi yang akuntabel.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana BPS.

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.

2.2 Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
T1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	80
SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	80
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	80
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100
	Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu	Publikasi	22
	Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	1
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei	Persen	98,06
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	80
SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	Pengunjung	11.000
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan evaluasi pembangunan nasional	Persen	60
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	80
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui	Jumlah metadata kegiatan statistik	Metadata	10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	sektoral dan khusus yang dihimpun		
SS3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	Jumlah metadata kegiatan statistik dektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10
T4. Peningkatan Birokrasi Yang Akuntabel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	58,12
SS4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	58,12
SS5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100

Keberhasilan pencapaian target sangat didukung oleh penganggaran di BPS Kabupaten Gunungkidul. Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) program, yaitu:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMPTTL),
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan
- 3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

BAB IV REVISI KINERJA

<https://gunungkidulkab.bps.go.id>



BAB III

Akuntabilitas Kinerja



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan BPS Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama satu tahun anggaran 2019, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

3.1 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Gunungkidul. Capaian kinerja diukur berdasarkan realisasi kegiatan dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019.

3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai BPS Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 adalah:

1. Peningkatan kualitas data statistik,
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik,
3. Peningkatan sistem statistik nasional (SSN) melalui koordinasi dan dan pembinaan yang efektif di bidang statistik,
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Rincian capaian kinerja tujuan BPS Kabupaten Gunungkidul seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan 1	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	80,00	96,97	120,00
2	Tujuan 2	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	80,00	97,20	120,00
3	Tujuan 3	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10	7	70,00
4	Tujuan 4	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	58,12	60,11	103,42
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan						103,36

Tujuan pertama yaitu “Peningkatan kualitas data statistik” diukur dengan indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik”. Indikator ini mencerminkan penilaian konsumen terhadap kualitas data statistik (BPS) yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Gunungkidul yang merupakan output dari berbagai kegiatan pada seksi Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi, Neraca Wilayah dan Analisis Statistik serta IPDS.

Berdasarkan Tabel di atas target tujuan peningkatan kualitas data statistik adalah 80,00 persen dan realisasi capaian menunjukkan bahwa 96,97 persen konsumen merasa puas dengan kualitas data BPS. Dengan demikian capaian kinerja tujuan peningkatan kualitas data statistik adalah sebesar 120,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan peningkatan kualitas data statistik telah tercapai dengan baik. Angka capaian kinerja sebesar 120,00 persen ini adalah angka batas maksimum untuk capaian kinerja di Form Rencana Aksi.

Secara umum, BPS kabupaten Gunungkidul telah melakukan beberapa hal untuk mencapai tujuan tersebut, di antaranya adalah:

1. Melaksanakan pelatihan petugas dalam setiap pelaksanaan survei dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang metodologi, konsep dan definisi, tata cara pelaksanaan survei serta manfaat data yang dihasilkan.
2. Melakukan pengawasan lapangan dan supervisi secara berkala dan berjenjang baik oleh subject matter maupun pimpinan BPS kabupaten Gunungkidul. Memastikan

bahwa pengawas sudah bertugas dengan baik, mendampingi pada awal-awal pelaksanaan lapangan dan memeriksa dokumen pencacahan sebelum diserahkan ke unit pengolahan.

3. Melaksanakan FGD dengan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan kegiatan survei.

Tujuan kedua yaitu “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik” diukur dengan indikator “persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS”. Adapun layanan data yang disediakan oleh BPS kabupaten Gunungkidul terdiri atas:

- a) Layanan konsultasi dan rekomendasi kegiatan statistik;
- b) Layanan konsultasi pengguna data;
- c) Layanan perpustakaan tercetak;
- d) Layanan perpustakaan digital;
- e) Layanan penjualan buku; dan
- f) Layanan data mikro/peta digital/*softcopy* publikasi.

Berbagai layanan data tersebut dapat diperoleh pengguna data dengan cara:

- a) Berkunjung langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Gunungkidul,
- b) Mengakses website BPS Kabupaten Gunungkidul,
- c) Melalui email BPS Kabupaten Gunungkidul.

Setiap permintaan data akan dilayani sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2019.

Berdasarkan **Tabel 3.1**, target tujuan peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik adalah 80,00 persen, dan realisasinya mencapai 97,20 persen. Dengan demikian capaian kinerja tujuan peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik adalah sebesar 120,00 persen (capaian kinerja maksimal) atau tercapai dengan baik.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan BPS kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST). PST merupakan pelayanan yang bersifat *one gate services* dan *one stop services*. Di dalam PST terdapat unit pelayanan perpustakaan tercetak, perpustakaan digital, data mikro, konsultasi statistik, penjualan publikasi *softcopy/hardcopy* dan pelayanan rekomendasi/bantuan survei. Penjualan publikasi *softcopy/hardcopy* merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang mekanismenya telah diatur dalam PP Nomor 7 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.

Tujuan ketiga yaitu “Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik” yang diukur dengan indikator “jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun”. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah

tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

Pada awal tahun target dari indikator tujuan ketiga ini ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) metadata. Namun berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik No. B-067/BPS/3000/03/2019 Tanggal 12 Maret 2019, disebutkan Satker Kabupaten/Kota mengumpulkan 6 kegiatan statistik sektoral/khusus di tingkat kabupaten/kota. Jadi berubah target dari 10 metadata ke 6 metadata, namun seksi IPDS belum merubah target tersebut. Oleh karena itu, realisasinya hanya mencapai 70,00 persen atau hanya dapat direalisasikan sebanyak 7 jenis metadata.

Tujuan keempat yaitu “Peningkatan birokrasi yang akuntabel” yang diukur dengan indikator “hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat”. Penilaian SAKIP meliputi 5 (lima) komponen besar yang menjadi objek evaluasi dari Inspektorat BPS. Kelima komponen besar tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Masing-masing komponen mempunyai bobot penilaian yang beragam. Dari total bobot (100), komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot (30), komponen pengukuran kinerja mempunyai bobot (25), pelaporan kinerja mempunyai bobot (15), evaluasi kinerja mempunyai bobot (10) dan capaian kinerja mempunyai bobot (20).

Berdasarkan Tabel 2.1., target nilai SAKIP yang ditetapkan adalah sebesar 58,12 poin dengan realisasi sebesar 60,11 poin atau mencapai 103,42 persen. Penetapan target ini didasarkan pada hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BPS. Beberapa catatan yang diberikan oleh inspektorat utama BPS antara lain belum terdokumentasi dengan baik kegiatan perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja serta masih adanya belum selaras antara perjanjian kinerja dengan renstra BPS kabupaten Gunungkidul.

Untuk pelaksanaan evaluasi kinerja, BPS kabupaten Gunungkidul telah membentuk Tim SAKIP yang terdiri dari perwakilan masing-masing seksi dan subbagian Tata Usaha yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala BPS Kabupaten Gunungkidul. Tim ini setiap triwulan melakukan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemukan dalam memenuhi target tersebut sekaligus mencari solusi untuk memecahkan kendala tersebut.

Dari capaian kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja tujuan BPS secara keseluruhan adalah sebesar 103,36 persen. Dengan demikian, dapat dikategorikan bahwa

upaya BPS Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pada tahun 2019 sudah berjalan dengan baik.

3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis Pertama

Tujuan pertama adalah “peningkatan kualitas data statistik”, diukur dengan indikator persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Tujuan pertama dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1. Peningkatan kualitas data statistik				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	80,00	96,97	120,00
SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	80,00	96,97	120,00
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	80,00	96,97	120,00
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100,00	100,00	100,00
Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu	Publikasi	22	22	100,00
Jumlah publikasi/laporan Sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	1	1	100,00
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei	Persen	98,06	98,77	100,72
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				106,79

Berdasarkan tabel diatas, capaian tujuan pertama yaitu peningkatan kualitas data statistik dengan indikator persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik tercapai yaitu sebesar 120,00 persen. Demikian pula untuk rata-rata capaian

indikator sasaran strategis sudah tercapai bahkan melebihi target, yaitu mencapai 106,79 persen.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini terdapat 6 (enam) indikator yaitu:

- a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
Target indikator sasaran strategis pertama dari tujuan pertama ini ditargetkan sebanyak 80,00 persen konsumen merasa puas dengan kualitas data statistik, ternyata realisasinya mencapai 96,97 persen atau dengan capaian kinerja sebesar 120,00 persen (capaian kinerja maksimal). Untuk mengukurnya, konsumen diminta menyatakan kepuasan terhadap kualitas data statistik (BPS) yang meliputi 5 (lima) ragam data, yaitu: Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi, Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. Hasil SKD diperoleh dari 30 responden.
- b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. Rujukan utama yang dimaksud adalah rujukan utama dalam berbagai kegiatan seperti tugas kuliah, skripsi/tesis/disertasi, penelitian, perencanaan, monitoring dan evaluasi dan penyebaran informasi dan jurnalistik. Pada tahun 2019 indikator ini ditargetkan sebesar 80 persen, realisasinya mencapai 96,97 persen. Realisasi pada tahun 2019 ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 90,48. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan data BPS sebagai rujukan utama dalam penyediaan data terus meningkat.
- c. Persentase pemutakhiran data MFD (Master File Desa) dan MBS (Master Blok Sensus).
Pada tahun 2019 indikator ini ditargetkan sebesar 100 persen dan realisasi yang dicapai sebesar 100,00 persen. Capaian kinerja indikator ketiga ini pada tahun 2018 juga 100 persen.
- d. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu.
Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu pada BPS kabupaten Gunungkidul selama setahun telah ditetapkan sebelumnya pada awal tahun. Pada tahun 2019 target piblikasi/laporan sebanyak 22 dan seluruhnya dapat dilakukan tepat waktu. Capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100 persen.
- e. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu.
Pada tahun 2019, BPS Kabupaten Gunungkidul menargetkan 1 (satu) buah publikasi atau laporan sensus yang merupakan hasil dari kegiatan pemetaan dan pemutakhiran muatan wilayah kerja statistik SP2020

dengan realisasi mencapai 100,00 persen.

f. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei.

Indikator ini dihitung dari jumlah dokumen survei yang masuk (*response*) dari petugas lapangan dibandingkan jumlah dokumen survei (sesuai target jumlah responden) pada periode waktu tertentu. Seksi yang menjadi penanggungjawab pencapaian target ini adalah Seksi Statistik Distribusi, Seksi Statistik Sosial, Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik dan Seksi Statistik Produksi. Pada tahun 2019 indikator ini ditargetkan sebesar 98,06persen dan realisasi yang dicapai sebesar 98,77 persen. Secara persentase, capaian kinerjanya menjadi 100,72 persen. Kendala yang dihadapi untuk mencapai target respon rate untuk survei dengan pendekatan rumah tangga di antaranya adalah: responden yang tidak dapat ditemui sampai batas akhir waktu pencacahan belum dapat ditemui karena masih bepergian, pindah alamat, dan rumah tangga tunggal yang meninggal. Kasus responden yang menolak didata, sampai dengan saat ini jarang sekali terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah tindak lanjut yang dilakukan antara lain: melakukan kunjungan ulang atau menyampaikan pesan melalui tetangga untuk dapat menemui responden pada saat yang tepat, serta melakukan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan lapangan secara berkala.

Dari keenam indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis yang pertama dalam tujuan, terlihat bahwa realisasi seluruh indikator telah mencapai 100 persen, bahkan beberapa indikator realisasinya di atas 100 persen.

Sasaran Strategis Kedua

Tujuan kedua adalah “peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, diukur dengan indikator persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS. Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*User Engagement*). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik

Sasaran Strategis/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik				
Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	80,00	97,20	120,00
SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)				
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	Pengunjung	11.000	20.297	120,00
Persentase Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	60	83,33	120,00
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	80	94,25	117,81
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				119,27

Sasaran strategis tersebut memiliki 3 (tiga) indikator yang terukur.

- a. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS.

Penanggung jawab dari indikator tersebut adalah Seksi IPDS. Sumber datanya berasal dari website BPS Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2019 jumlah pengunjung website sebanyak 20.297 melampaui target yang ditetapkan pada awal tahun yaitu 11.000 pengunjung. Jumlah pengunjung website semakin meningkat karena saat ini pengguna data dapat mengunduh data secara mudah dan gratis dari website. Hal ini dapat dijadikan acuan BPS Kabupaten Gunungkidul supaya lebih meningkatkan lagi tampilan *website* dengan ragam data yang lebih variatif dan menarik karena banyak konsumen data yang mengakses data maupun publikasi BPS Kabupaten Gunungkidul.

- b. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

Penanggung jawab dari indikator diatas adalah Seksi IPDS. Sumber datanya berasal dari Survei Kebutuhan Data yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2019, persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional pada awalnya ditargetkan sebesar 60 persen, dan telah terealisasi sebesar 83,33 persen. Capaian target yang tinggi mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan seharusnya masih

bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, untuk capaian di atas 120,00 persen, disepakati dilakukan revisi terhadap target yang telah ditetapkan sehingga capaian maksimalnya sebesar 120,00 persen. Selain untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan, persentase pemanfaatan data BPS tertinggi masih untuk tujuan penelitian yang meliputi penyusunan tugas akhir di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi.

c. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS.

Penanggungjawab dari indikator diatas adalah Seksi IPDS. Sumber datanya berasal dari Survei Kebutuhan Data yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Gunungkidul. Konsumen diminta menilai kepuasan terhadap akses data statistik (BPS) yang meliputi 5 (lima) ragam data, yaitu: Data Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi, dan Neraca wilayah dan Analisis Statistik. Pada tahun 2019 persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS ditargetkan 80,00 persen, dan terealisasi sebesar 94,25 persen atau mencapai 117,81 persen dari target.

Dari 3 (tiga) indikator yang digunakan, 2 (dua) indikator capaian kinerjanya melebihi 120 persen sehingga sesuai kesepakatan bahwa yang dituliskan 120 persen (maksimal). Tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian kinerja tujuan kedua yaitu peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik dengan indikator persentase konsumen yang merasa puas akan layanan data BPS tercapai 120,00 persen. Demikian halnya capaian indikator sasaran melebihi target yaitu mencapai 119,27 persen.

Sasaran Strategis Ketiga

Tujuan ketiga adalah “penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik”. Tujuan ketiga dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.4.
Capaian Kinerja Tujuan: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui Koordinasi dan Pembinaan yang Efektif di Bidang Statistik

Sasaran Strategis/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik				
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10	7	70.00
SS3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN				
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10	7	70,00
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				70,00

Indikator dari sasaran strategis ketiga adalah jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun. Penanggung jawab dari indikator di atas adalah seksi IPDS dan sumber datanya berasal dari laporan monitoring metadata sektoral dan khusus. Pada tahun 2019, target jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun adalah sebanyak 10 (sepuluh) metadata dengan realisasi sebanyak 7 (tujuh) metadata atau sebesar 70,00 persen. Hal ini terjadi karena pada bulan Januari 2019, awal target dari indikator tujuan ketiga ini ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) metadata. Namun berdasarkan Surat dari Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik No. B-067/BPS/3000/03/2019 Tanggal 12 Maret 2019, disebutkan Satker Kabupaten/Kota mengumpulkan 6 kegiatan statistik sektoral/khusus di tingkat kabupaten/kota. Jadi berubah target dari 10 metadata ke 6 metadata, namun seksi IPDS belum sempat merubah pada laporan bulan April dan seterusnya. Oleh karena itu, realisasinya hanya mencapai 70,00 persen atau hanya dapat direalisasikan sebanyak 7 jenis metadata.

Sasaran Strategis Keempat

Tujuan keempat adalah “peningkatan birokrasi yang akuntabel”. Tujuan keempat dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya birokrasi yang akuntabel dan (2) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel

Sasaran Strategis/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	58,12	60,11	103,42
SS4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel				
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	58,12	60,11	103,42
SS5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS				
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80,00	96,67	120,00
Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				107,81

Sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang akuntabel memiliki 1 (satu) indikator yaitu hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat. Pada tahun 2019 indikator ini ditargetkan 58,12 poin sesuai dengan hasil penilaian SAKIP tahun sebelumnya dan terealisasi 60,11 poin atau mencapai 103,42 persen. Peningkatan ini merupakan wujud dari implementasi SAKIP yang semakin baik dari tahun ke tahun. Penyusunan dokumen SAKIP diawali dengan kegiatan perencanaan kerja. Penyusunan rencana kerja BPS Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui rapat seluruh tim SAKIP. Dokumen yang dihasilkan berupa “rencana aksi/perjanjian kinerja” yang memuat target dan output organisasi dalam setahun.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan dari target yang telah ditetapkan, dilakukan pemantauan kinerja secara berkala setiap triwulan. Pemantauan yang dilakukan berupa rapat yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan tim SAKIP. Pemantauan kinerja bertujuan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan kemudian mengisinya ke dalam Form Rencana Aksi yang selanjutnya diupload ke monev bps.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan laporan kinerja. Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kinerja dan dokumen anggaran. Laporan kinerja disusun dengan melibatkan seluruh anggota tim SAKIP BPS Kabupaten Gunungkidul.

Sasaran Strategis Kelima

Sasaran kedua dari tujuan keempat yaitu meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS yang memiliki 2 (dua) indikator terukur yaitu:

1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS. Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Subbagian Tata Usaha. Sumber datanya berasal dari Survei Kebutuhan Data yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2019 indikator ini ditargetkan sebesar 80 persen dan terealisasi 96,67 persen sehingga capaian kinerjanya mencapai angka maksimal 120 persen. Tercapainya target kinerja tahun 2019 ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pengguna layanan merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan sarana BPS.
2. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan.
Sarana dan prasarana aparatur sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur.

Tahun 2019 persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan ditargetkan 100,00 persen, dan telah seluruhnya terselesaikan atau mencapai 100,00 persen dari target.

3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul

Perkembangan capaian kinerja 2019 jika dibandingkan dengan capaian kinerja periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6.
Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan	100,00	99,89	101,92	109,63	103,36
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis	93,85	111,83	110,40	118,10	100,97

Berdasarkan tabel di atas, secara umum rata-rata capaian kinerja tujuan maupun sasaran strategis menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi pada tahun



2019 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya untuk rata-rata capaian kinerja tujuan dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan capaian kinerja, di mana capaian maksimal adalah 120 persen.

3.3 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul Terhadap Target Renstra 2015 - 2019

Capaian kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul terhadap target Renstra 2015-2019 dihitung berdasarkan realisasi 2018 terhadap target 2018 pada Renstra 2015-2019. Capaian kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul terhadap target Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja 2019 terhadap Target Renstra 2015 - 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1. Peningkatan kualitas data statistik				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	80,00	96,97	120,00
SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	80,00	96,97	120,00
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	62,00	96,97	120,00
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100,00	100,00	100,00
Jumlah publikasi/laporan Statistik yang terbit tepat waktu	Publikasi	52	22	42,31
Jumlah publikasi/laporan Sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	1	1	100,00
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei	Persen	94,00	98,77	105,07
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik				
Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan dataBPS	Persen	80,00	97,20	120,00
SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)				
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	6 500	20 297	120,00

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	75,00	83,33	111,11
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	78,00	94,25	120,00
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik				
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	1	7	120,00
SS3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN				
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	1	7	120,00
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	75	60,11	80,15
SS4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	75	60,11	80,15
SS5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS				
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	85,00	96,67	113,73
Persentase Pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Indikator Tujuan				110,04
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				104,03

Tahun 2019 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra 2015-2019. Secara umum baik tujuan maupun sasaran strategisnya telah tercapai. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 110,04 persen dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 104,03. Capaian indikator tujuan yang belum sesuai target adalah tujuan keempat yaitu hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Namun demikian hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat ini selalu mengalami kenaikan poin setiap tahunnya.

Rata-rata sasaran strategis melebihi target yaitu lebih dari 104,03 persen. Pada sasaran strategis ini hampir semua komponen tercapai lebih dari 100 persen. Utamanya adalah dari sisi jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website* dari target 6.500 pengunjung, realisasi yang mengakses sebesar 20.297 pengunjung atau lebih tiga kali lipat dari target yang ditetapkan. Capaian Kinerja Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu hanya tercapai 42,31 persen. Hal ini

disebabkan karena penetapan target pada renstra meliputi seluruh publikasi/laporan, namun realisasi yang seharusnya dicapai adalah publikasi/laporan yang masuk dalam ARC.

3.4 Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Kegiatan prioritas BPS Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 adalah: Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan 2019, Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) 2019, Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) Sensus Penduduk 2020, Survei Wisatawan Nusantara Tahun 2019 dan Survei Disagregasi PMTB Tahun 2019.

3.4.1. Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan 2019

Pelaksanaan Survei Ubinan Tanaman Pangan 2019 di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan setiap subround (4 bulanan). Subround I dimulai pada bulan Januari sampai dengan April, Subround II dimulai pada bulan Mei sampai dengan Agustus dan Subround III dimulai pada bulan September sampai dengan Desember. Informasi pokok yang dikumpulkan melalui Survei Ubinan adalah data produktivitas (hasil per hektar) tanaman padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar.

Informasi pendukung lainnya yang juga dikumpulkan dalam Survei Ubinan antara lain jenis lahan, cara penanaman, sistem penanaman jajar legowo (khusus padi), jenis kegiatan peningkatan produksi, banyaknya benih yang digunakan, jenis varietas benih yang digunakan (khusus padi dan jagung), banyaknya pupuk yang digunakan, informasi bantuan benih, pupuk, alsintan dan informasi kualitatif terkait dengan produktivitas. Survei ubinan dilaksanakan bersamaan dengan masa panen petani padi atau palawija.

Tabel 3.8.
Jadwal Kegiatan Survei Ubinan Tanaman Pangan 2019 Kabupaten Gunungkidul

No	Uraian Kegiatan	Jadwal
(1)	(2)	(3)
SURVEI UBINAN SUBROUND (SR) I		
1	Pemutakhiran Daftar Rumah Tangga Ubinan	15-31 Desember 2018
2	Pemeriksaan pemutakhiran daftar rumah tangga ubinan	20 Des 2018-4 Januari 2019
3	Entri Pemutakhiran dan Pemilihan sampel rumah tangga ubinan	30 Des 2018-12 Januari 2019
4	Pencacahan rumah tangga ubinan	Januari-April 2019
5	Pemeriksaan dan pengawasan dokumen ubinan	Januari-April 2019
6	Entri dan validasi dokumen ubinan	Februari-Mei 2019
7	Pengiriman data ke BPS Provinsi	Mei 2019
SURVEI UBINAN SUBROUND (SR) II		
1	Pemutakhiran Daftar Rumah Tangga Ubinan	16-30 April 2019
2	Pemeriksaan pemutakhiran daftar rumah tangga ubinan	20 April-7 Mei 2019
3	Entri Pemutakhiran dan Pemilihan sampel rumah tangga ubinan	7-11 Mei 2019
4	Pencacahan rumah tangga ubinan	Mei-Agustus 2019
5	Pemeriksaan dan pengawasan dokumen ubinan	Mei-Agustus 2019
6	Entri dan validasi dokumen ubinan	Mei-September 2019
7	Pengiriman data ke BPS Provinsi	September 2019
SURVEI UBINAN SUBROUND (SR) III		
1	Pemutakhiran Daftar Rumah Tangga Ubinan	15-31 Agustus 2019
2	Pemeriksaan pemutakhiran daftar rumah tangga ubinan	20 Agst-6 Sept 2019
3	Pemilihan sampel rumah tangga ubinan	5-10 September 2019
4	Pencacahan rumah tangga ubinan	September-Desember 2019
5	Pemeriksaan dan pengawasan dokumen ubinan	September-Desember 2019
6	Entri dan validasi dokumen ubinan	September-Desember 2019
7	Pengiriman data ke BPS Provinsi	Januari 2020

Target jumlah blok sensus dan jumlah rumah tangga yang akan dicacah sudah ditentukan dari BPS RI. Di tingkat kabupaten, BPS Kabupaten Gunungkidul melakukan updating rumah tangga yang akan menjadi sampel ubinan, untuk kemudian dilakukan Pangan subround I dan II tahun 2018 dilaksanakan di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu di 18 kecamatan. Sedangkan untuk subround III dilaksanakan di 10 kecamatan.

Pelaksanaan lapangan Survei Ubinan Tanaman Pangan ada dua tahapan, yaitu tahap pertama updating/pemutakhiran rumah tangga ubinan dalam blok sensus sampel dan tahap kedua berupa pencacahan rumah tangga ubinan. Pemutakhiran rumah tangga dan pendaftaran petak di setiap bidang lahan untuk suatu subround dilakukan pada bulan terakhir subround sebelumnya. Dokumen yang digunakan dalam updating/pemutakhiran rumah tangga ubinan adalah SUB-P 2019. Petugas yang melakukan pemutakhiran data adalah mitra statistik yang ditunjuk dan atau KSK. Berbekal daftar SUB-P 2019 dan peta ST2013-WB/ SP2010-WB petugas melakukan pendaftaran secara *door to door* sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Pada survei ubinan komoditas palawija, unit sampel survei ubinan adalah rumah tangga usaha tanaman pangan yang melakukan panen pada subround tertentu, sedangkan untuk Survei Ubinan komoditas padi unit sampelnya adalah subsegmen hasil Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) Padi. Dalam kegiatan KSA dilakukan pengamatan untuk KSA Padi dan KSA Jagung.

Pencacahan rumah tangga sampel ubinan dilaksanakan per subround sesuai dengan masa panen petani. Pencacahan dilakukan dengan melakukan observasi di lapangan yakni di lahan sawah atau lahan bukan sawah yang menjadi plot ubinan sesuai rumah tangga yang menjadi sampel ubinan untuk mengetahui produksi padi atau palawija. Pencacahan dilakukan sesuai metode survei ubinan yakni dengan menggunakan alat ubinan yang telah disediakan oleh BPS RI untuk membatasi seluas 2,5 meter x 2,5 meter. Setelah dilakukan penimbangan hasil produksi dilanjutkan dengan wawancara dengan responden menggunakan dokumen SUB-S 2019.

Pada pelaksanaan survei ubinan tanaman pangan pada tahun 2019 melibatkan mitra statistik. Mitra statistik ini diambil dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Gunungkidul. Sebelum melaksanakan survei ubinan, mereka diberikan pelatihan khusus baik teori maupun praktek lapangan terkait survey ubinan ini. Pelatihan Survei Ubinan untuk mitra dilaksanakan tanggal 26 - 28 April 2018 di Hotel Atrium Yogyakarta. Peserta yang dilibatkan dalam pelatihan ini sebanyak 22 petugas.



Gambar 3.1.
Pembukaan dan *Try Out* Pelatihan Petugas Survei Ubinan

Pencacahan rumah tangga ubinan dilaksanakan oleh KSK/mitra statistik dan KCD. Untuk nomor urut ubinan ganjil pelaksanaannya menjadi tanggung jawab KSK/mitra statistik, sementara untuk nomor urut ubinan genap pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala Cabang Dinas (KCD)/ Mantri Tani.



Gambar 3.2.
Pelaksanaan Survei Ubinan 2019

Tabel 3.9.
Target Sampel dan Realisasi Plot Survei Ubinan Tahun 2019 Menurut Jenis Tanaman

No	Alokasi Sampel Plot Ubinan	Alokasi Sampel Plot Ubinan					
		Subround I		Subround II		Subround III	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi sawah irigasi	49	38	82	63	16	26
2	Padi sawah non irigasi	66	26	93	52	42	25
2	Padi ladang	183	119	113	72	42	12
3	Jagung	185	107	130	59	111	16
4	Kedelai	41	15	59	23	47	4
5	Kacang tanah	183	83	227	94	197	156
6	Ubi Kayu	0	0	211	161	127	1
7	Ubi Jalar	0	0	10	4	0	0
	Jumlah	707	388	925	528	582	240

Catatan: *) Realisasi Subround III berdasarkan realisasi dokumen yang masuk ke BPS.

Melihat keadaan target dan realisasi Survei Ubinan 2019, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Survei Ubinan antara lain:

- Terbatasnya alat ubinan yang tersedia dibandingkan dengan petugas yang dilatih bersertifikat. Jumlah petugas KSK dan Mitra untuk Survei Ubinan di BPS Kabupaten Gunungkidul sebanyak 13 orang KSK dan 22 orang Mitra Bersertifikat jadi total ada 35 orang petugas, sedangkan banyaknya alat ubinan yang tersedia, setelah diinventarisir hanya ada 13 set. Ini akibat dari kanibal terhadap alat-alat yang rusak atau ada bagian yang hilang dari waktu ke waktu.
- Perilaku petani dalam mengubah jadwal panen. Seringkali petugas mengalami keadaan dimana setelah dilakukan kunjungan untuk membuat janji dengan petani mengenai jadwal panen, serta-merta tidak dapat dilakukan ubinan karena kebiasaan petani yang sewaktu-waktu dapat mengubah jadwal panennya. Misalnya ketika petugas mengunjungi petani dengan menanyakan jadwal panen direncanakan 5 hari berikutnya. Akan tetapi karena situasi di sawah/tegalan harus berburu waktu dengan tenaga yang memanen, hama (tikus, burung) atau dengan cuaca, tiba-tiba 2 hari sebelum jadwal panen yang dijanjikan ke petugas, dilakukan pemanenan tanpa

memberitahu petugas survei ubinan. Kadang-kadang karena ketidak-tahuan petani akan kepentingan ubinan, petani memberitahukannya setelah panen usai, sehingga tidak bisa diubin.

- Waktu panen hampir bersamaan. Oleh karena kebanyakan petani di Kabupaten Gunungkidul mengandalkan cuaca/musim sehingga waktu menanam hampir bersamaan konsekuensinya waktu panennya juga hampir bersamaan. Dengan terbatasnya alat sebagaimana dijelaskan di atas, sementara mobilitas alat ubinan tidak semuanya memungkinkan untuk dipindahkan antar kecamatan maka informasi panen dari petani tidak semuanya dapat ditindak lanjuti dengan dilakukan ubinan.

3.4.2. Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) 2019

Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi adalah suatu metode baru yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerjasama dengan BPS dalam rangka memperbaiki metode pengumpulan data luas panen yang didasarkan pada hasil pandangan mata petugas pengumpul data (*eye estimate*). Metode ini dilakukan dengan cara yang lebih obyektif dan modern dengan melibatkan perangkat teknologi di dalamnya. Sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Pendataan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia .

KSA didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi sistem informasi geografi (SIG), pengideraan jauh, teknologi informasi, dan statistika yang saat ini sedang diimplementasikan di Indonesia untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan. Pendekatan KSA diharapkan mampu menjawab penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional.

Pelaksanaan kegiatan KSA ini dapat terwujud sebagai hasil kerjasama antara BPS dan BPPT. Unit statistik (statistical unit) yang menjadi sasaran kegiatan sampai ke level Kecamatan, sedangkan obyek komoditas pertanian tanaman pangannya adalah padi. Namun demikian masih memungkinkan untuk pengembangan ke depan diperluas untuk komoditas tanaman pangan yang lainnya.

Pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) 2019 dilakukan setiap bulan dengan waktu khusus selama 7 hari terakhir setiap akhir bulan. KSA dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah sampel KSA Padi sebanyak 140 segmen. Petugas yang dialokasikan sebanyak 28 PCS dan 10 PMS merupakan petugas yang sudah dilatih tahun

sebelumnya. Pelatihan petugas lapangan KSA Padi dilakukan pada tanggal 16-18 Januari 2018 di Grand Keisha Yogyakarta. Pada awal tahun 2019 juga dilakukan briefing untuk menjaga euphoria petugas dengan semangat menjalankan metode yang masih relatif baru.



Gambar 3.3.
Pembukaan Pelatihan Petugas KSA Padi Januari 2018 dan Briefing Petugas KSA Padi Januari 2019

Survei ini dilakukan dengan mengamati fase pertumbuhan tanaman padi pada sampel segmen yang dilakukan pada 7 (tujuh) hari terakhir di bulan pengamatan. Aplikasi survei KSA membutuhkan alat bantu GPS yang sudah diaktifkan. Petugas lapangan akan melakukan observasi di 9 titik pengamatan di setiap segmen yang berukuran 300 m x 300 m. Ada 8 fase pertumbuhan padi/ kondisi titik pengamatan yaitu : vegetatif awal, vegetatif akhir, generatif, panen, persiapan lahan, puso, lahan yang ditanam bukan padi (sawah bukan padi), bukan sawah (hutan, pemukiman, jalan, tubuh air).



Gambar 3.4.
Pelaksanaan Lapangan Kegiatan Pendataan KSA 2019

Response rate dari kegiatan KSA Padi 2019 di Kabupaten Gunungkidul mencapai 100% yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10.
Target Sampel dan Realisasi Survei KSA Padi Tahun 2019

No	Bulan Pengamatan	Jumlah Segmen	
		Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Januari	140	140
2	Februari	140	140
3	Maret	140	140
4	April	140	140
5	Mei	140	140
6	Juni	140	140
7	Juli	140	140
8	Agustus	140	140
9	September	140	140
10	Oktober	140	140
11	November	140	140
12	Desember	140	140

Pendataan KSA 2019 juga dilakukan untuk komoditi jagung. Pendataan KSA Jagung dimulai dari bulan April 2019. Jumlah sampel pendataan KSA Jagung sebanyak 110 segmen dilaksanakan dengan melibatkan 15 petugas PCS dan 5 petugas PMS. Pada setiap segmen KSA jagung yang berukuran 100 m x 100 m dibuat 4 subsegmen. Pengamatan dilakukan pada 4 subsegmen. Hasil pengamatan bisa dikirimkan untuk dievaluasi oleh PMS jika keempat sub segmen sudah berhasil dilakukan pendataan.

Response rate dari kegiatan KSA Jagung 2019 di Kabupaten Gunungkidul mencapai 100% yang terdapat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11.
Target Sampel dan Realisasi Survei KSA Jagung Tahun 2019

No	Bulan Pengamatan	Jumlah Segmen	
		Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	110	110
5	Mei	110	110
6	Juni	110	110
7	Juli	110	110
8	Agustus	110	110
9	September	110	110
10	Oktober	110	110
11	November	110	110
12	Desember	110	110

3.4.3. Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) Sensus Penduduk 2020.

a. Pendahuluan

Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah sensus penduduk ke-7 sejak Indonesia merdeka. Sejak tahun 2018, persiapan SP2020 bidang kerangka induk sudah dilakukan. Salah satu unit kerja yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pengembangan kerangka induk BPS adalah Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS) yakni melaksanakan penyusunan dan pengembangan kerangka induk. Kerangka induk yang lengkap, akurat, relevan, dan mutakhir pada wilayah kerja statistik (wilkerstat) akan dijadikan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan sensus dan survei BPS. Wilkerstat terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, blok sensus (BS) dan Satuan Lingkungan Terkecil (SLS) terkecil berupa Rukun Tetangga (RT).

Kerangka induk yang dibuat BPS selama ini terdiri dari peta dan muatan BS. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kerangka induk

terus dilakukan. Pada prinsipnya, kerangka induk yang dibangun adalah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan sensus dan survei BPS yang menggunakan berbagai macam metode statistik.

Tahun 2018, Kegiatan Penyusunan Peta Dasar dan Informasi Muatan Wilkerstat SP2020 telah menghasilkan peta dasar SP2020 yang terdiri dari peta desa/kelurahan dan BS. Selain itu juga telah dilakukan *ground check/ground truth* pada 50 BS terpilih. Tahun 2019, peta dasar tersebut akan digunakan dalam kegiatan dengan informasi satuan lingkungan setempat (SLS) di Kabupaten Gunungkidul ada sekitar 6.844 RT.

Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 dilakukan di seluruh desa atau sebanyak 144 desa se-Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap pertama kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat, serta tahap kedua kegiatan Pengolahan Peta dan dokumen muatan wilkerstat. Dokumen muatan wilkerstat yang diolah adalah SP2020-RS dan SP2020-RD. Selanjutnya kegiatan tahap kedua disebut Pengolahan Peta dan RD.

Penarikan data dan pengiriman data di fasilitasi oleh sistem bernama Sistem Informasi Data Spasial. Sistem ini terdiri dari beberapa sub sistem diantaranya adalah Sistem Informasi Peta Digital (SIDIGIT) untuk mengundah atau menggugah peta digital dan Sistem Informasi Peta Analog (SIPETA) untuk mengunduh atau mengunggah Peta-WA dan Peta-WB.

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP 2020 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12.
Jadwal Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020

Kegiatan	Tanggal
(1)	(2)
BPS Kabupaten/Kota	
Tahap 1 (Lapangan)	
1. Pelatihan petugas	8 Maret – 12 April 2019
2. Pelaksanaan Lapangan	22 April – 22 Mei 2019
Tahap 2 (Pengolahan)	
1. Pengolahan SP2020-RD dan SP2020-RS	6 Mei – 17 Juni 2019
2. Pengolahan peta digital hasil lapangan	23 Mei – 25 Juli 2019
3. Layouting peta	13 September – 30 Oktober 2019
BPS Provinsi	
Tahap 1 (Lapangan)	
1. Pelatihan Inda	4 – 16 Maret 2019
Tahap 2 (Pengolahan)	
1. Pelatihan petugas pengolahan peta dan RD	22 April – 3 Mei 2019
2. Kompilasi dan revalidasi RD	17 Juni – 14 Juli 2019
3. Pengiriman RD	1 – 14 Juli 2019
4. Kompilasi dan sinkronisasi peta digital	22 Juli – 8 Agustus 2019
BPS Pusat	
Tahap 1 (Lapangan)	
1. Pelatihan Innas	25 Februari – 1 Maret 2019
Tahap 2 (Pengolahan)	
1. Pelatihan innas pengolahan peta dan RD	8 - 12 April 2019
2. Sinkronisasi dan pengecekan peta digital	1 Agustus – 12 September 2019

b. Rekrutmen Petugas

Kegiatan rekrutmenpetugas Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 di BPS Kabupaten Gunungkidul perlu direncanakan dan dilaksanakan sebaik-baiknya agar diperoleh petugas yang berkualitas. Berdasarkan hasil rapat hari Selasa, 22 Januari 2019 di BPS Provinsi D.I.Yogyakarta perihal Penjelasan umum mengenai Pemetaan dan Pemutakiran Muatan Wilkerstat 2020 tahun 2019, maka BPS Kabupaten Gunungkidul menetapkan sebagai berikut:

Penentuan Standar Operating Prosedur (SOP) Rekrutmen Calon Petugas Pemetaan 2019:

1. KSK merekrut calon mitra dengan alokasi per desa atau calon mitra yang datang sendiri ke kantor untuk mendaftar.
2. KSK memberikan link ke calon mitra untuk mengisinya ke <https://goo.gl/forms/DpUDz2ViOgC23>.
3. Seksi IPDS yang memberikan link ke calon mitra yang datang sendiri.
4. Calon Petugas mengisi daftar isian yang ada melalui HP.
5. Menunggu rekapitulasi calon petugas.
6. Memanggil calon untuk datang ke kantor BPS Kabupaten Gunungkidul melalui KSK atau yang langsung melalui HP.
7. Dipesankan membawa HP yang siap untuk Pemetaan, fotokopi KTP, Fotokopi ijazah terakhir, Surat lamaran untuk menjadi Petugas Pemetaan.
8. Wawancara mulai 18 s.d. 21 Februari 2019.

Syarat Petugas Pemeta:

- a. Mitra yang ditunjuk
- b. Diutamakan minimal berpendidikan SLTA atau sederajat
- c. Bisa membaca peta, baik sketsa maupun peta digital (co. *Google Maps*)
- d. Diutamakan memiliki smartphone Android dengan spesifikasi:
 - Minimal versi 4.0.3, dengan GPS internal
 - Kapasitas internal storage yang tersedia minimal 1 GB
 - Kapasitas RAM minimal 2 GB
- e. Terbiasa menggunakan aplikasi berbasis Android
- f. Mengikuti Pelatihan Pemetaan Wilkerstat (8 – 28 Maret 2019)

Beban Tugas Pemeta:

- a. Rata-rata wilayah beban tugas pemeta adalah 10 BS
- b. Melakukan penggambaran batas SLS
- c. Menghitung muatan per SLS dan mengisi SP2020-RS
- d. Melakukan geotagging infrastruktur dan batas SLS

Syarat Petugas Pengawas:

- a. Pegawai BPS atau mitra yang ditunjuk
- b. Diutamakan minimal berpendidikan SLTA atau sederajat
- c. Bisa membaca peta, baik peta sketsa maupun peta digital (co. *Google Maps*)
- d. Diutamakan memiliki smartphone Android dengan spesifikasi:
 - Minimal versi 4.0.3, dengan GPS internal
 - Kapasitas internal storage yang tersedia minimal 1 GB
 - Kapasitas RAM minimal 2 GB



- e. Terbiasa menggunakan aplikasi berbasis Android
- f. Mengikuti Pelatihan PemetaanWilkerstatpada tanggal 8-28 Maret 2019

Beban Tugas Pengawas:

- a. Rata-rata mengawasi 5 orang pemeta atau 50 BS
- b. Melakukan pemeriksaan peta dan dokumen SP2020-RS
- c. Mengisi dokumen SP2020 -RD
- d. Melakukan sinkronisasi batas desa dan SLS pada WA

Syarat Petugas Pengolah Peta dan RD:

- a. Kasi atau staf IPDS BPS atau mitra yang ditunjuk
- b. Minimal berpendidikan SLTA atau sederajat
- c. Terbiasa menggunakan computer
- d. Diutamakan berumur maksimal 45 tahun
- e. Bisa membaca peta, baik peta sketsa maupun peta digital (co: *Geogle Maps*)
- f. Diutamakan yang terbiasa menggunakan aplikasi pengolah peta digital, seperti ArcGIS dan QGIS
- g. Mengikuti pelatihan Pengolah Peta dan RD pada tanggal 15-26 April 2019

Adapun alokasi petugas yang akan direkrut dan jadwal wawancara petugas dapat dilihat pada Tabel 3.13. dan 3.14.

Tabel 3.13.
Matrik Kebutuhan Petugas Pemetaan per Kecamatan

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	BS	RW	RT	Petugas BS		Rata-rata per RT	Pengawas	Total Petugas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PANGGANG	6	44	83	44	271	8,3	9	30,1	2	11
2	PURWOSARI	5	32	62	32	220	6,2	7	31,4	2	9
3	PALIYAN	7	50	106	50	251	10,6	11	22,8	3	14
4	SAPTOSARI	7	60	111	60	335	11,1	12	27,9	3	15
5	TEPUS	5	83	108	84	351	10,8	11	31,9	3	14
6	TANJUNGSARI	5	72	101	71	299	10,1	11	27,2	3	14
7	RONGKOP	8	100	91	100	320	9,1	10	32,0	2	12
8	GIRISUBO	8	82	99	82	258	9,9	10	25,8	2	12
9	SEMANU	5	106	205	136	520	20,5	21	24,8	5	26
10	PONJONG	11	119	161	120	517	16,1	17	30,4	4	21
11	KARANGMOJO	9	104	167	104	479	16,7	17	28,2	4	21
12	WONOSARI	14	103	252	151	612	25,2	26	23,5	6	32
13	PLAYEN	13	101	208	101	604	20,8	21	28,8	5	26
14	PATUK	11	72	118	82	323	11,8	12	26,9	3	15
15	GEDANGSARI	7	67	142	67	352	14,2	15	23,5	3	18
16	NGLIPAR	7	53	113	53	286	11,3	12	23,8	3	15

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	BS	RW	RT	Petugas BS		Rata- rata per RT	Pengawas	Total Petugas
17	NGAWEN	6	67	125	67	252	12,5	13	19,4	3	16
18	SEMIN	10	116	169	120	542	16,9	18	30,1	4	22
Kab. Gunungkidul		144	1431	2421	1524	6792	242	253	26,8	60	313

Tabel 3.14.
Jadwal Wawancara Calon Petugas Pemetaan per Kecamatan

No.	Hari /Tanggal	Kecamatan
(1)	(2)	(3)
1.	Senin, 18 Februari 2019	Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, ada 77 orang.
2.	Selasa, 19 Februari 2019	Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, ada 71 orang.
3.	Rabu, 20 Februari 2019	Karangmojo, Wonosari, Playen, ada 79 orang.
4.	Kamis, 21 Februari 2019	Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, ada 86 orang.

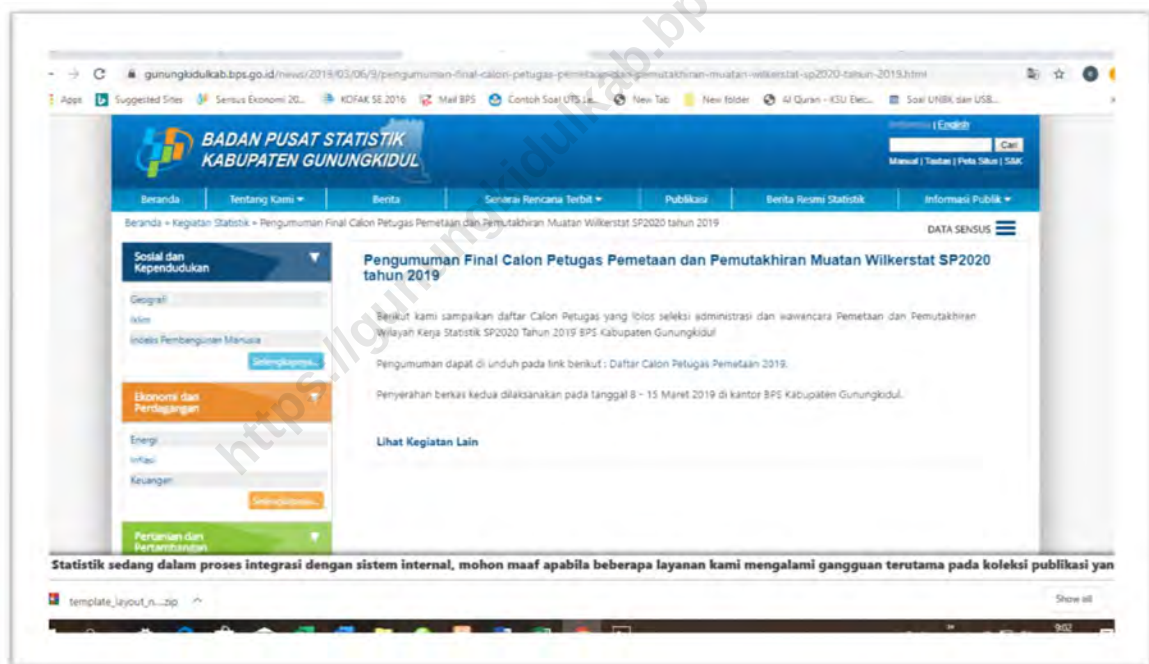
*)Ket: Dari Jam 8.30 WIB s.d 15.00 WIB

Alur Tes Wawancara Calon Petugas Pemetaan 2019

1. Peserta datang dengan tertib, kendaraan bermotor diparkir dengan rapi dan diharap Tidak Merokok di Lingkungan Kantor;
2. Peserta lapor ke satpam;
3. Mengisi daftar hadir;
4. Menunggu panggilan petugas (Satpam/Irfan/Agung) dan ditunjukkan ke meja pewawancara yang kosong;
5. Proses wawancara oleh pewawancara;
6. Selesai.



Gambar 3.5.
Tes Wawancara Petugas Pemetaan 2019



Gambar 3.6.
Pengumuman Final Calon Petugas via Web

c. Pelatihan

Pelatihan petugas Pemetaan Wilkerstat bertujuan untuk melatih petugas pengawas dan pemeta. Di BPS Kabupaten Gunungkidul diberi 1 orang petugas sebagai koordinator lapangan (korlap).

Tugas Petugas Pemeta

1. Pemeta menggambarkan batas SLS/non SLS pada peta SP2020WB-Sementara dan Peta2020WA-Sementara di wilayah tugasnya;
2. Pemeta menghitung muatan SLS/non SLS utuh yang berada di wilayah tugasnya;
3. Pemeta melakukan *Geotagging* batas SLS/non SLS dan bangunan infrastruktur.

Tugas Pengawas

1. Pengawas memeriksa seluruh dokumen dan peta yang diisi pemeta;
2. Pengawas mengisi dokumen SP2020-RD dan SP2020-RS dalam satu desa;
3. Pengawas melakukan kompilasi batas SLS/non SLS dalam satu desa di Peta SP2020WA-Sementara.

Tugas Korlap

1. Korlap mengoordinir pengawas dan membantu memeriksa dokumen dan peta, terutama untuk desa/kelurahan/kecamatan yang berbatasan langsung;
2. Korlap membantu pengawas melakukan kompilasi dokumen SP2020-RD per desa;
3. Korlap membantu pengawas dan memastikan batas SLS/non SLS dan batas desa sesuai kondisi lapangan.

Berikut tabel 3.15 dan 3.16 merupakan *rundown* dan jadwal pelatihan.

Tabel 3.15.
Rundown Pelatihan Petugas Pemetaan Wilkerstat

Hari ke-	Waktu	Materi
(1)	(2)	(3)
1	08.00 - 09.00	Registrasi
	09.00 - 10.00	Pembukaan
	10.00 - 10.15	<i>Coffee break</i>
	10.15 - 12.15	Penjelasan umum (pendahuluan) & Konsep dan definisi
	12.15 - 13.30	Ishoma
	13.30 - 15.30	Metodologi
	15.30 - 15.45	<i>Coffee break</i>
	15.45 - 17.45	Materi pemeta
	17.45 - 19.30	Ishoma
	19.30 - 21.30	Materi pemeta (lanjutan)
2	08.00 - 09.00	Materi pemeta (lanjutan) & Pengisian dokumen pemeta
	09.00 - 10.00	Aplikasi Wilkerstat untuk pemeta
	10.00 - 10.15	<i>Coffee break</i>

Hari ke-	Waktu	Materi
	10.15 - 12.15	Role Playing
	12.15 - 13.30	Ishoma
	13.30 - 15.30	Pembahasan Role Playing
	15.30 - 15.45	<i>Coffee break</i>
	15.45 - 17.45	Pendalaman
	17.45 - 18.00	Evaluasi dan penutupan petugas pemeta
	17.45 - 18.00	Evaluasi dan penutupan
3	08.00 - 10.00	Materi pengawas
	10.00 - 10.15	<i>Coffee break</i>
	10.15 - 11.15	Materi pengawas (lanjutan)
	11.15 - 12.15	Aplikasi Wilkerstat untuk pengawas
	12.15 - 13.30	Ishoma
	13.30 - 15.30	Pengisian dokumen pengawas
	15.30 - 15.45	<i>Coffee break</i>
	15.45 - 17.45	Pengisian dokumen pengawas (lanjutan)
	17.45 - 18.00	Evaluasi dan penutupan

Tabel 3.16.
Jadwal Pelatihan

Gelombang I	Kamis-Minggu 21-24 Maret 2019	Kelas IA	Kelas IB	Kelas IC	Kelas ID
Gelombang II	Senin-Kamis 25-28 Maret 2019	Kelas IIA	Kelas IIB	Kelas IIC	Kelas IID
Gelombang III	Jumat-Senin 29 Maret-1 April 2019	Kelas IIIA	Kelas IIB	Kelas IIC	-
Total Peserta	314				
Jumlah Kelas	11				
Jumlah Panitia	22				
Rata-rata kelas	24-32 orang per kelas				



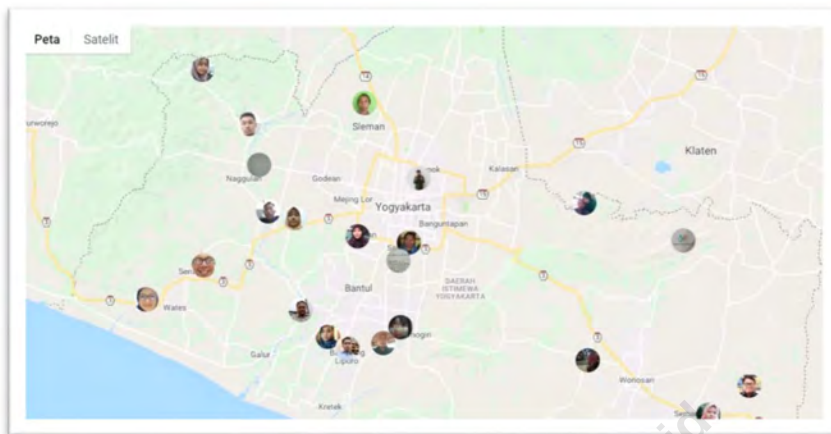
Gambar 3.7.
Suasana Kelas Pelatihan Petugas Pemetaan Tahun 2019

d. Pelaksanaan Kegiatan Lapangan Pemetaan

Kegiatan pelaksanaan lapangan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 yang dilakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul dimulai pada 22 April 2019 - 22 Mei 2019. Sebelum pelaksanaan lapangan dimulai, Seksi IPDS Kabupaten Gunungkidul mencetak peta wilayah blok (WB) sebanyak 2.421 Blok Sensus dan peta desa Wilayah Administrasi (WA) sebanyak 144 peta. Kemudian menyiapkan surat pemberitahuan ke camat dan kepala desa mengenai pelaksanaan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 di Kabupaten Gunungkidul. Lalu berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul agar pelaksanaan lapangan berjalan dengan lancar. Selanjutnya membuat alokasi petugas dan wilayah tugasnya.



Gambar 3.8.
Rekonsiliasi Pemetaan 2019 di Kecamatan Nglipar



Gambar 3.9.
Monitoring Pemetaan 2019 per Petugas

e. Kegiatan Pengolahan Pemetaan

Pengolahan RD

Pengolahan RD di BPS Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut:

1. Update master wilayah jika terdapat perubahan master wilayah oleh Seksi IPDS.
2. Pelaksanaan entri dokumen SP2020-RS dan SP2020-RD oleh operator.
3. Mengeluarkan tabulasi dan rekapitulasi entri untuk tahap pengecekan.
4. Melakukan konfirmasi ulang kepada petugas lapangan terhadap data yang kurang sesuai, kemudian memperbaikinya.
5. Mengirimkan data entri ke BPS provinsi.

Petugas yang terlibat dalam RD adalah sebagai berikut:

- Endarto SST, M.Si.
- Eni Nuraeni, S.ST
- Rinto Harwadi Kurniawan, S.Si., MPA
- Annisa Diah Sekarini (di briefing Innas Pemetaan dari BPS Provinsi)
- Beby Agung Sungkowo (di briefing Innas Pemetaan dari BPS Provinsi)
- Dewi Restu Agustina (dilatih ole BPS Provinsi)
- Intan Permatasari(dilatih ole BPS Provinsi)
- Rahma Nur Fauziah (dilatih ole BPS Provinsi)

Tabel 3.17.
Hasil Pengolahan SP2020-RD Pemetaan 2019 Kabupaten Gunungkidul per 7 Agustus 2019

Wilayah	Jumlah SLS	Jumlah KK	Jumlah BSTT	Jumlah BSBTT	Jumlah BSTTK	Jumlah Muatan	Jumlah BSKEKO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(3403010) PANGGANG	271	6.979	6.973	632	258	7.863	740
(3403011) PURWOSARI	222	4.996	4.783	332	172	5.287	460
(3403020) PALIYAN	252	10.182	8.399	518	354	9.271	962
(3403030) SAPTO SARI	338	9.743	9.538	590	219	10.347	839
(3403040) TEPUS	351	9.315	9.355	831	272	10.458	1.015
(3403041) TANJUNGSARI	299	8.069	7.425	947	315	8.687	1.152
(3403050) RONGKOP	321	8.733	7.525	376	323	8.224	760
(3403051) GIRISUBO	259	6.285	6.299	373	430	7.102	852
(3403060) SEMANU	520	17.323	15.629	1.245	936	17.810	2.189
(3403070) PONJONG	519	16.001	14.479	1.084	641	16.204	1.630
(3403080) KARANGMOJO	480	16.671	14.844	1.062	993	16.899	1.767
(3403090) WONOSARI	618	24.021	23.260	4.029	1.387	28.676	5.463
(3403100) PLAYEN	605	18.423	17.093	1.514	1.230	19.837	2.858
(3403110) PATUK	323	10.411	9.564	579	483	10.626	1.130
(3403120) GEDANG SARI	352	11.994	10.573	474	450	11.497	1.377
(3403130) NGLIPAR	289	9.605	9.049	689	463	10.201	958
(3403140) NGAWEN	282	10.902	9.626	603	454	10.683	1.237
(3403150) SEMIN	543	17.092	15.293	1.311	905	17.509	2.054
Total	6.844	216.745	199.707	17.189	10.285	227.181	27.443

Pengolahan Peta

Seksi IPDSbertanggung jawab mengaturkegiatan pengolahan peta. Dari sejumlah petugas pengolahan peta di BPS Kabupaten Gunungkidul ditunjuk satu orang sebagai koordinator. Dalam pelaksanaanya, petugas pengolah disebut juga sebagai editor yaitu:

- Endarto S.ST, M.Si.
- Eni Nuraeni, S.ST
- Rinto Harwadi Kurniawan, S.Si., MPA
- Devi Eko Wati (di briefing Innas Pemetaan dari BPS Provinsi)
- Elisa Mutyawati (di briefing Innas Pemetaan dari BPS Provinsi)
- Annisa Diah Sekarini (di briefing Innas Pemetaan dari BPS Provinsi)
- Dewi Restu Agustina (dilatih ole BPS Provinsi)



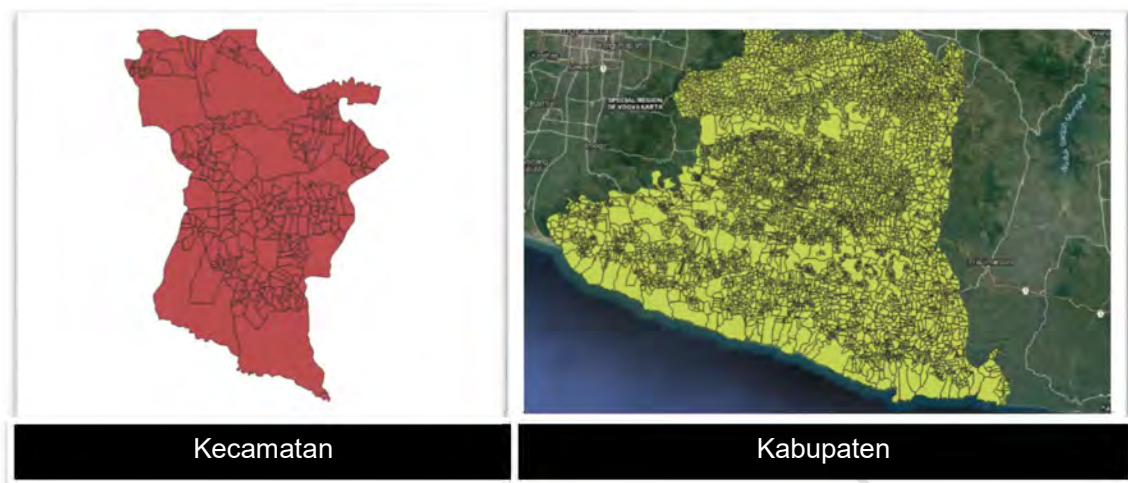
- Toni Setiawan (di briefing Innas Pemetaan dari BPS Provinsi)
- Rahma Nur Fauziah (dilatih oleh BPS Provinsi)

Tugas seorang koordinator adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan seluruh bahan:
 - a. Melakukan scan SP2020WA-Sementara dan SP2020WB-Sementara hasil lapangan.
 - b. Melakukan generate master hasil pengolahan RD dari aplikasi RD.
 - c. Melakukan download bahan dari SIDIGIT.
2. Memotong peta desa per kecamatan.
3. Mendistribusikan peta desa per kecamatan ke setiap editor.
4. Menggabungkan peta SLS/non SLS per kecamatan menjadi satu kabupaten/kota.
5. Melakukan proses *cleaning* dan mengembalikan kembali peta SLS/non SLS ke editor jika belum *clean*.
6. Menghilangkan gap/overlap antar kecamatan.
7. Melakukan peleburan peta SLS/non SLS menjadi peta desa (*dissolve*).
8. Melakukan *upload* hasil kegiatan ke dalam system dataspasial (SIDIGIT dan SIPETA).

Tugas editor adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitasi SLS/non SLS berdasarkan SP2020WA-Sementara/SP2020WB-Sementara hasil lapangan.
2. Melakukan proses *cleaning* peta SLS/non SLS yaitu dengan memastikan tidak *gap/overlap*, tidak ada ID yang duplikat, *match* antara peta SLS/non SLS dengan RD.
3. Menyerahkan ke koordinator peta yang sudah *clean*.
4. Melakukan *layouting* untuk wilayah kerjanya.



Gambar 3.10.
Peta Kecamatan dan Kabupaten Setelah Digitasi

f. Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 tahun 2019 BPS Kabupaten Gunungkidul antara lain sebagai berikut :

1. Setelah Pelatihan selama 3 hari, masih ada beberapa pegawai yang tidak memahami penggunaan aplikasi pemetaan sehingga diperlukan briefing untuk dapat menggunakan aplikasi.
2. Server yang sering bermasalah yang menghambat *upload geotagging*.
3. Banyaknya aktivitas rutin selain pemetaan dikhawatirkan penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga ditambahkan beberapa personel dari IPDS untuk membantu mengerjakan.
4. Beberapa peta digital di beberapa wilayah kecamatan ada yang melewati batas kabupaten lain dan ada beberapa wilayah yang berada di Kabupaten Gunungkidul tetapi tergambar tidak berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan batas yang kurang jelas sehingga diperlukan *Ground Check*.
5. Beberapa peta WB tidak digambarkan *landmark* yang ada di wilayah tersebut sehingga membingungkan petugas pemetaan untuk melakukan digitasi.
6. Perbaikan peta digital perlu dilakukan beberapa kali karena ada beberapa poligon yang hilang beberapa kali setelah dilakukan proses *cleaning*.
7. *Uploading* peta desa yang sudah *layout* memerlukan waktu yang cukup lama karena harus *upload* per desa dan jaringan sering terputus.

g. Output Kegiatan/Indikator Kinerja

1. Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020 dapat dilaksanakan dan selesai tepat waktu.
2. Realisasi kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020:
 - a. Pengolah RD
 - Master wilayah beserta perubahannya 1 file.
 - Master SLS dan non SLS per Desa.
 - Muatan bangunan sensus per segmen dan per SLS.
 - b. Pengolah Peta
 - Peta digital BS 3403 final sebanyak 1 file
 - Peta digital desa 3403 final sebanyak 1 file
 - Peta SP2020WA-sementara sebanyak 144 file
 - Peta SP2020WB-sementara sebanyak 2421 file
 - Peta posisi landmark sebanyak 1 file
 - Foto landmark sebanyak 1 file

3.4.4. Survei Wisatawan Nusantara Tahun 2019

Kegiatan pendataan wisnus dimulai sejak tahun 1981. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu modul dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) setiap 3 tahun sekali yang dilaksanakan pada tahun 1984, 1991, 1994, 1997, 2002, 2003, dan 2008. Angka tahunan yang digunakan merupakan proyeksi dari data hasil kegiatan tersebut. Mulai tahun 2011, seiring dengan perubahan periodisasi Susenas, pendataan wisnus dilakukan setiap tiga bulan (triwulan). Kegiatan ini dicakup dalam Susenas KOR sehingga data tahunannya diperoleh dari gabungan empat triwulan. Data ini kemudian digunakan sebagai kerangka sampel dalam kegiatan Survei Profil Wisatawan Nusantara. Namun sejak triwulan empat tahun 2014, kegiatan pendataan tersebut berhenti seiring dengan perubahan periode pendataan Susenas. Pada tahun 2015 hingga saat ini, Susenas KOR hanya dilakukan sekali setahun yaitu pada bulan Maret. Keadaan ini akan sangat berpengaruh jika data perjalanan (wisnus) diambil dari susenas KOR, terutama data mengenai jumlah perjalanan selama satu tahun. Pendataan profil wisnus pada tahun 2015 tidak menggunakan kerangka sampel dari data Susenas KOR karena pengolahan datanya belum selesai pada saat kegiatan dilakukan. Mengingat pentingnya ketersediaan data dan informasi perihal kegiatan perjalanan beserta semua aspek yang terkait secara rinci, cermat, dan tepat waktu, maka diperlukan pengumpulan data-data tersebut secara terencana, berkesinambungan dan kontinyu. Salah satu upaya yang dilakukan dalam

mengumpulkan informasi tersebut adalah melalui kegiatan Survei Wisatawan Nusantara pada tahun 2019 untuk melanjutkan kegiatan yang serupa di tahun 2016, 2017 dan tahun 2018. Sejak Tahun 2018, kegiatan Survei Wisatawan Nusantara masuk sebagai program prioritas nasional.

Pelatihan petugas lapangan merupakan tahapan kegiatan yang sangat penting. Pelatihan petugas dilaksanakan sebelum pelaksanaan lapangan. Tujuan dilaksanakan pelatihan petugas adalah untuk menyamakan persepsi petugas. Dalam kegiatan Survei Wisatawan Nusantara banyak konsep dan definisi yang harus dikuasai oleh setiap petugas. Dengan adanya pelatihan petugas ini, maka setiap petugas akan mempunyai pemahaman yang sama mengenai konsep dan definisi yang digunakan dalam kegiatan Survei Wisatawan Nusantara tahun 2019.

Pelatihan calon petugas lapangan Survei Wisatawan Nusantara tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul diselenggarakan di Hotel Cyka Raya, Siraman, Wonosari pada tanggal 4 April 2019 (paket *full day*). Calon petugas sebanyak 21 orang terdiri dari 17 orang sebagai Petugas Pencacah Lapangan (PCL) dan 4 orang sebagai Petugas Pengawas/Pemeriksa Lapangan (PML).



Gambar 3.11.
Suasana Kelas Pelatihan Petugas Survei Wisatawan Nusantara Tahun 2019

Pendaftaran rumah tangga dilakukan dengan cara pemutakhiran. Dengan menggunakan DaftarVRTJ-L yaitu suatu daftar yang berbentuk form terdiri dari blok identitas yaitu identitas rumah tangga. Daftar ini juga memuat informasi tujuan perjalanan hasil pendaftaran

Survei Wisatawan Nusantara dilakukan secara triwulanan, masing-masing triwulan sebanyak 19 Blok Sensus. Blok Sensus yang terpilih pada triwulan 1 dan 2 dilakukan pendaftaran rumah tangga (Listing) dan pencacahan sampel rumah tangga yang melakukan perjalanan dengan Daftar VRTJ-S yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keterangan anggota rumah tangga yang melakukan perjalanan “wisata” di

wilayah geografis Indonesia atau yang bisa disebut dengan wisatawan nusantara (wisnus), yang dilakukan selama Triwulan 1, 2 dan 3, sedangkan untuk triwulan 4 hanya dilakukan pendaftaran rumah tangga saja, tanpa dilakukan pencacahan sampel rumah tangga.



Gambar 3.12.
Pendataan Survei Wisatawan Nusantara Tahun 2019

Secara umum pelaksanaan kegiatan pengumpulan data Survei Wisatawan Nusantara (Wisnus) 2019 BPS Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Permasalahan-permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan dapat diminimalisir dan terselesaikan dengan baik sehingga pelaksanaan Kegiatan pengumpulan data Survei Wisatawan Nusantara (Wisnus) 2019 dapat selesai tepat waktu.

Output kegiatan ini, adalah backup dan split data updating listing sebanyak 4 (empat) triwulan (76 Blok Sensus) dan back up dan split data hasil pencacahan pada bulan April, Juli dan Oktober 2019 sebanyak 475 sampel rumah tangga jalan dan Laporan Kegiatan Tahun 2019 Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 3.18.
Target dan Realisasi Sampel Survei Wisatawan Nusantara Tahun 2019

No.	Kecamatan	Target (Rumah tangga jalan)	Realisasi (Rumah Tangga jalan)
1	Panggang	14	14
2	Purwosari	13	13
3	Paliyan	30	30
4	Saptosari	5	5
5	Tepus	30	30
6	Tanjungsari	13	13
7	Rongkop	19	19

No.	Kecamatan	Target (Rumah tangga jalan)	Realisasi (Rumah Tangga jalan)
8	Girisubo	6	6
9	Semanu	59	59
10	Ponjong	46	46
11	Karangmojo	27	27
12	Wonosari	82	82
13	Playen	44	44
14	Patuk	17	17
15	Gedangsari	10	10
16	Nglipar	15	15
17	Ngawen	23	23
18	Semin	22	22
	Jumlah	475	475

Dari hasil listing yang telah dilakukan pada triwulan 1 , triwulan 2 dan triwulan 3 pada Blok Sensus sampel yang tersebar pada 18 kecamatan telah dialokasikan sampel dengan jumlah 475 rumah tangga, dan realisasinya 475 rumah tangga dapat ditemui dan dapat diwawancarai.

3.4.5. Survei Disagregasi PMTB Tahun 2019

Sejalan dengan Prioritas Nasional tahun 2019 yaitu “Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif Lainnya”, program “Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan”, kegiatan “Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi”, dibutuhkan data investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dirinci menurut sector institusi dan lapangan usaha. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB.

Kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kegiatan perencanaan dan persiapan pada tahun 2017, kegiatan pengumpulan data dan diseminasi hasil disagregasi PMTB tahun 2018, serta kegiatan pengumpulan data lanjutan dan penyusunan stok kapital tahun 2019. Pada tahun 2017, BPS telah melaksanakan kegiatan internalisasi dan sosialisasi kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB dengan *subject matter* terkait di BPS, BPS di tingkat wilayah provinsi dan kabupaten/kota dan kementerian/Lembaga terkait untuk menjalin kerjasama dalam hal

penyediaan data dan pelaksanaan survei pada tahun 2018. Adapun kegiatan lanjutan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 adalah pengumpulan data PMTB untuk seluruh unit institusi atau selanjutnya disebut dengan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB.

Survei Penyusunan Disagregasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) 2019 bertujuan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis barang modal, lapangan usaha dan sector institusi serta meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi. Dengan tersedianya data PMTB yang rinci ini, akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor dalam berusaha serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya.

Data PMTB merupakan salah satu komponen PDRB yang juga digunakan sebagai variabel utama penghitungan Stok Kapital dan Penyusutan yang akan menjadi variabel untuk penghitungan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* & *Multi Factor Productivity (MFP)*. ICOR dan MFP merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi investasi suatu lapangan usaha. Juga digunakan untuk menganalisa investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Pelaksanaan Survei Disagregasi PMTB Tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul, dimulai dari tahap Pelatihan Petugas, Pelaksanaan Lapangan dan Pengolahan Data secara *online* serta hasilnya dilakukan rekonsiliasi di tingkat Provinsi D.I. Yogyakarta untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi secara nasional.

Sampel Survei Disagregasi PMTB 2019 Kabupaten Gunungkidul memperoleh alokasi sebanyak 98 sampel yang terdiri dari :

1. 26 sampel Rumah Tangga
2. 9 sampel Lembaga Non Profit
3. 53 sampel Korporasi Finansial dan Korporasi Non Finansial
4. 8 sampel Dinas Pemerintah Daerah, dan
5. 2 sampel Pemerintah Desa.

Dengan jumlah sampel sebanyak 98, jumlah petugas yang terlibat sebanyak 6 petugas pencacah lapangan (PCL) dan 2 petugas pengawas/pemeriksa (PML). Pelaksanaan lapangan dimulai pada bulan April sampai dengan Juni 2019, yang diawali dengan Pelatihan Petugas pada tanggal 25 - 27 Maret 2019 yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi D.I. Yogyakarta di Hotel Neo Awana Yogyakarta.



Gambar 3.13.
Pelatihan Petugas Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2019

Sampel PMTB menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, dengan jumlah yang berbeda antar kecamatan. Sampel perusahaan seluruhnya dikerjakan oleh mitra dengan beban tugas sebanyak 15 usaha/non usaha. Setiap pencacah dalam menjalankan tugasnya tidak hanya di kecamatan asal, tetapi lintas kecamatan dengan tujuan agar merata jumlah beban tugasnya. Demikian juga untuk seluruh jenis kuesioner diusahakan merata untuk setiap jenis kuesioner.

Sedangkan sampel dinas seluruhnya dikerjakan oleh staf NWA. Hal ini disebabkan karena selama ini BPS telah minta data ke dinas – dinas baik untuk penyusunan publikasi DDA maupun data untuk survei – survei rutin. Sehingga harapannya untuk masuk ke dinas tidak perlu melalui negosiasi lagi. Selain itu diharapkan data PMTB yang diminta dapat selesai tepat waktu dan dapat terisi seluruhnya. Seandainya ada data yang kurang lengkap, dapat minta melalui telepon atau email.



Gambar 3.14.
Pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019

Kendala pencacahan Survei Disagregasi PMTB 2019 di Kabupaten Gunungkidul diantaranya adalah:

1. Sampel responden yang sudah tidak *eligible* yaitu :
 - a. sampel rumah tangga terpilih bukan rumah tangga usaha,
 - b. sampel rumah tangga tunggal sudah meninggal/pindah,
 - c. masih ditemukan sampel perusahaan terpilih merupakan korporasi pemerintah,
 - d. sampel perusahaan sudah tutup/tidak aktif lagi
 - e. sampel lembaga non profit nama dan alamat kurang spesifik, sehingga ditemui nama yang sama dengan alamat yang sama atau tidak dapat ditemukan.
2. Sampel responden rumah tangga mengelompok di Kecamatan Wonosari.
3. Beberapa sampel perusahaan harus dilakukan kunjungan berulang kali karena belum bisa bertemu dengan responden.
4. Sampel perusahaan ada yang menolak di wawancara/non respon.
5. Isian Kuesioner dokumen Survei PMTB hasil pencacahan beberapa belum lengkap.

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut dilakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai SOP yang telah ditentukan. Sampel responden yang sudah tidak *eligible* dilakukan penggantian sampel dengan daftar sampel pengganti. Sampel responden rumah tangga yang mengelompok di Kecamatan Wonosari sehingga petugas semua merupakan mitra statistik dari Kecamatan Wonosari. Kunjungan ulang pada sampel responden memang diperlukan untuk mendapatkan data yang benar-benar *valid* dan pengawasan pendataan dari pengawas/pemeriksa (PML) dioptimalkan untuk menjaga kualitas isian kuesioner. Perusahaan yang menolak diwawancara/non respon dilakukan pendekatan persuasif. Sampai dengan akan berakhirnya masa pencacahan ternyata masih non respon maka dilakukan penggantian sampel.

Realisasi Pencacahan Survei PMTB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dapat tercapai 100 persen. Hal ini dapat tercapai karena disediakannya sampel pengganti sehingga sampel yang tidak *eligible* dapat dilakukan penggantian. Secara rinci target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19.
Target dan Realisasi Pencacahan Survei PMTB Tahun 2019

No	Jenis Sampel	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rumah Tangga	26	26
2.	Lembaga Non Profit	9	9
3.	Korporasi Finansial & Non Finansial	53	53
4.	Dinas Pemerintah Daerah	8	8
5.	Pemerintah Desa	2	2

3.5. Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2019 diantaranya adalah penghematan sumber daya energi dan penganggaran. Dari sisi sumber daya energi, BPS Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk hemat energi listrik dan air. Dari sisi penganggaran, upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2019 diantaranya adalah penghematan anggaran melalui *selfblocking*. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi/penghematan anggaran kementerian lembaga K/L pada tahun 2019.

Upaya penghematan dalam penggunaan energi terlihat pada pemakaian listrik yang menyerap anggaran hanya 83,84 persen dari anggaran yang disediakan atau sebesar Rp. 53.147.173 dari anggaran Rp. 63.391.000. untuk pemakaian air Rp. 2.217.400 atau sebesar 94,28 persen dari pagu yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp. 2.352.000. Penggunaan telepon juga telah dilakukan penghematan dimana pagu yang dianggarkan sebesar Rp 1.800.000 tetapi realisasi hanya Rp. 999.263 atau hanya sebesar 55,51 persen saja.

Selain itu, upaya efisiensi juga dihasilkan dari proses pengadaan barang jasa yang dilakukan melalui penyedia. Total pagu program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi yang tersedia sebesar Rp. 542.480.000 terealisasi Rp. 527.143.698 atau sebesar 97,17 persen. Pengadaan barang dan jasa di BPS Kabupaten Gunungkidul yang dilaksanakan melalui penyedia yaitu: 1) perluasan gedung baru dengan pagu Rp. 472.980.000 dan realisasi mencapai 97,90 persen atau sebesar Rp. 463.053.698; 2) pengadaan peralatan dan mesin (AC dan mebeulair) dengan pagu Rp. 69.500.000 dan realisasi mencapai 92,22 persen atau sebesar Rp. 64.090.000.

Efisiensi juga dapat dilihat dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART). Tingkat efisiensi BPS Kabupaten Gunungkidul menurut hasil

pengukuran aplikasi SMART rata-rata sebesar 6,9 dengan capaian kinerja sebesar 90,13. Hasil tersebut menunjukkan tingkat efisiensi terhadap tercapainya target output cukup tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran.

3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Pagu anggaran BPS Kabupaten Gunungkidul untuk menjalankan kegiatan selama tahun 2019 adalah sebesar 9,058 milyar rupiah yang terbagi ke dalam 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Selama tahun 2019 BPS Kabupaten Gunungkidul telah melakukan 5 (lima) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Anggaran semula Rp 7.975.594.000 menjadi Rp 9.058.487.000 pada DIPA terakhir

- Revisi DIPA yang pertama tanggal 2 Mei 2019 disebabkan adanya perubahan alokasi sampel maupun teknis pelaksanaan untuk beberapa kegiatan seperti Susenas Kor dan Konsumsi, Survei IMK Tahunan, Pengembangan data Hortikultura Potensi dengan menggunakan Frame ST2013 Per Komoditas Per Rumah Tangga, Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020 dan Survei Wisatawan Nusantara. Revisi DIPA pertama menyebabkan perubahan pagu awal Rp 7.975.594.000 menjadi Rp 8.047.462.000
- Revisi DIPA kedua tanggal 10 Juli 2019 dilaksanakan dengan tujuan efisiensi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penyesuaian Tunjangan Kinerja. Pagu anggaran tidak mengalami perubahan dari revisi DIPA pertama yaitu Rp 8.047.462.000
- Revisi DIPA ketiga tanggal 26 September 2019 adanya efisiensi untuk pemenuhan belanja pegawai. Pagu anggaran bertambah dari Rp 8.047.462.000 menjadi Rp 9.058.487.000
- Revisi DIPA keempat tanggal 15 Oktober 2019 disebabkan pergeseran anggaran belanja pegawai dan pergeseran anggaran untuk penggunaan sisa anggaran kontraktual (optimalisasi anggaran PSPA). Total revisi DIPA keempat tidak mengalami perubahan dari Revisi DIPA ketiga yaitu Rp 9.058.487.000
- Revisi DIPA kelima tanggal 29 November 2019 dilaksanakan atas dasar pemenuhan kekurangan belanja operasional, rencana penarikan halaman III DIPA dan Pemutakhiran POK. Total revisi DIPA kelima tidak mengalami perubahan dari Revisi DIPA ketiga yaitu Rp 9.058.487.000.

Realisasi anggaran BPS Kabupaten Gunungkidul menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20.
Realisasi Anggaran Tahun 2019 Menurut Program

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	5.762.217.000	5.588.902.368	96,99
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	542.480.000	527.143.698	97,17
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	2.753.790.000	2.562.782.992	93,06
Total	9.058.487.000	8.678.829.058	95,81

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program DMPTTL adalah sebesar 96,99 persen dari pagu anggaran program DMPTTL; realisasi anggaran program PSPA adalah sebesar 97,17 persen dari pagu anggaran program PSPA; dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 93,06 persen dari pagu anggaran program PPIS. Penyerapan program PPIS paling kecil diantara program yang lainnya, sedangkan penyerapan program PSPA paling besar diantara program yang lainnya. Penyerapan anggaran BPS secara keseluruhan adalah sebesar 95,81 persen dari total pagu tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2018, terjadi peningkatan penyerapan anggaran sebesar 2,99 persen.

Rincian anggaran menurut sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21.
Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	2.711.110.000	2.529.897.000	93,32
Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)	39.620.000	35.956.000	90,75
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	3.060.000	0	0,00
Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	5.762.217.000	5.585.831.860	96,94
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS	542.480.000	527.143.698	97,17
Total	9.058.487.000	8.678.829.058	95,81

Menurut sasaran kinerja, anggaran terbesar dialokasikan untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya birokrasi yang akuntabel” yaitu sebesar Rp. 5.762.217.000. Dari anggaran yang disediakan, realisasinya mencapai 96,94 persen atau sebesar Rp. 5.585.831.860.

Sasaran kinerja selanjutnya yaitu “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS” mendapatkan alokasi anggaran terbesar ke dua yaitu Rp. 2.711.110.000. Realisasinya mencapai 93,32 persen atau sebesar Rp. 2.529.897.000.

Sasaran “Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS” mendapat alokasi sebesar Rp. 542.480.000 dengan realisasi 97,17 persen atau terserap Rp. 527.143.698.

Sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)” mendapat alokasi Rp. 39.620.000 dengan realisasi 90,75 persen atau sebesar Rp. 35.956.000.

Sedangkan yang mendapat alokasi terkecil yaitu sasaran “Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN sebesar Rp. 3.060.000 dengan realisasi 0 persen. Hal ini disebabkan karena pengumpulan data metadata ke 7 dinas/instansi dilakukan pada jam kantor dan di dalam Kota Wonosari, oleh staf IPDS yang bertugas mengumpulkan data tersebut. Sehingga anggaran perjalanan dinas lebih dari 8 jam tidak dicairkan.

BAB IV REVISI KINERJA

<https://gunungkidulkab.bps.go.id>



BAB IV

Penutup



4.1. Tinjauan Umum

Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul merupakan perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Gunungkidul untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBN yang dituangkan kedalam DIPA Tahun Anggaran 2019 Nomor : 054.01.2.019234/2019, secara periodik selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Gunungkidul dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2015 - 2019, yang terdiri dari 4 (empat) tujuan yang meliputi 5 (lima) sasaran strategis. Sesuai dengan visi-nya, BPS Kabupaten Gunungkidul sebagai “pelopor data statistik terpercaya untuk semua”, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang *objective, up to date, reliable, complete*, dan *on time*, serta *user friendly*, yang juga dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat.

Ada 4 (empat) tujuan yang harus dicapai BPS Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik, (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, (3) Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, dan (4) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang harus dicapai. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan tercapai 103,25 persen dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 101,22. Meskipun demikian upaya-upaya peningkatan kinerja terus dilakukan oleh BPS Kabupaten Gunungkidul, terutama dalam hal peningkatan kualitas data statistik dan peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.

4.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul pada tahun mendatang adalah:

- a. Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan seminar. Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar/ijin belajar pada jalur formal seperti melanjutkan

pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 guna pencapaian peningkatan mutu sumber daya manusia.

- b. Memberikan motivasi kepada pejabat fungsional statistisi ahli untuk lebih giat dalam menulis karya tulis ilmiah baik untuk diterbitkan di media (surat kabar, *online*) maupun untuk dipresentasikan di internal BPS ataupun instansi lain.
- c. Melakukan re-targeting pada indikator “Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama” sesuai realisasi pada tahun 2018.
- d. Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini secara optimal.
- e. Untuk meningkatkan pemasukan dokumen (*response rate*) diupayakan dengan berbagai pendekatan, misalnya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendekatan kepada asosiasi pengusaha tentang kegiatan, hasil dan pemanfaatan data statistik.
- f. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah.
- g. Perlunya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi untuk berbagai kegiatan BPS Kabupaten Gunungkidul. Selain itu juga mengadakan pendekatan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder.
- h. Mengoptimalkan fungsi tim SAKIP dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

BAB IV REVISI KINERJA

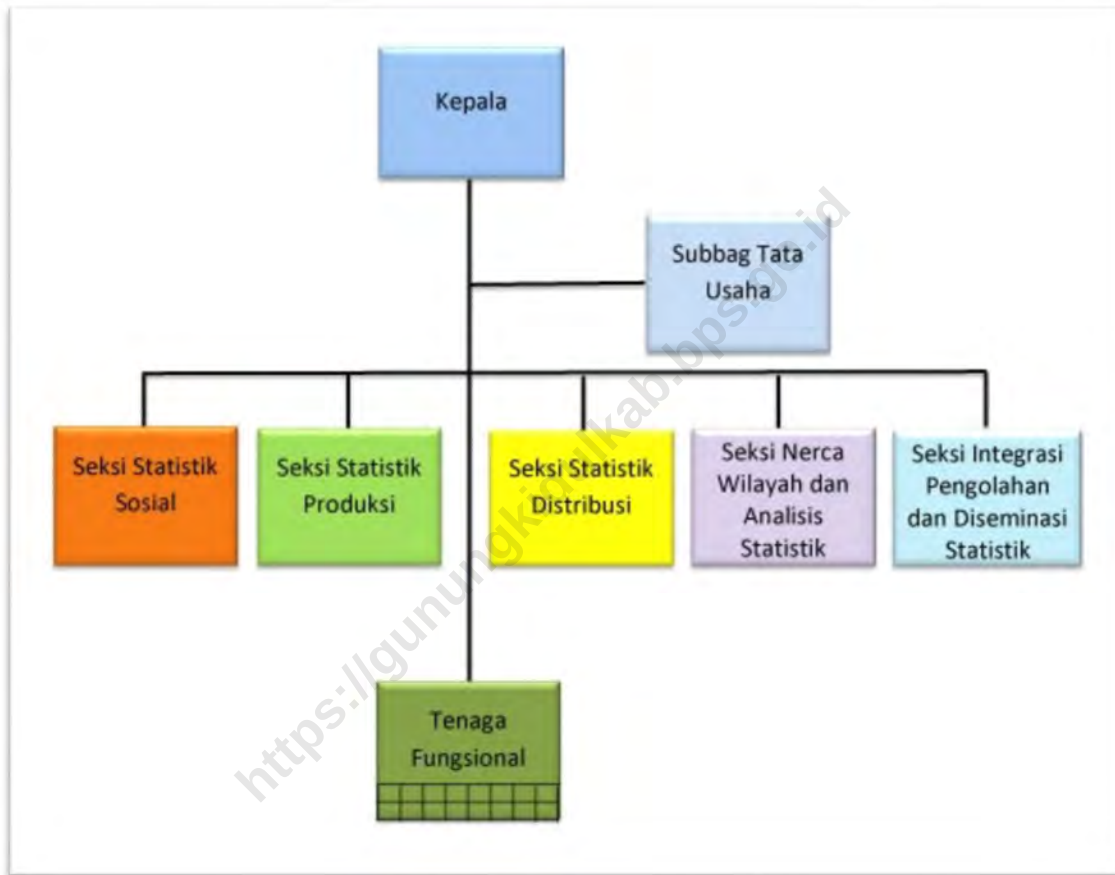
<https://gunungkidulkab.bps.go.id>



LAMPIRAN



Lampiran 1. Struktur Organisasi BPS Kabupaten Gunungkidul



Lampiran 2. Rencana Strategis BPS Kabupaten Gunungkidul

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul						
	SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS					
	1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%	80%	80%	80%	80%
	1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	50%	53%	56%	59%	62%
	1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%
	1.4. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	46	53	54	53	52
	1.5. Jumlah Publikasi/Laporan Sensus yang terbit tepat waktu	-	1	1	1	-
	1.6. Persentase pemasukan dokumen (response rate)	92%	92%	93%	93%	94%
	SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)					
	2.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	2.2. Persentase Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional		60%	70%	75%	75%
	2.3. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	70%	72%	74%	76%	78%
	SS.3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN					
	3.1. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	-	-	1	1	1
	SS.4. Meningkatnya Birokrasi yang akuntabel					
	4.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	55	60	65	70	75
	4.2. jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota yang berpredikat WBK/WBBM	-	-	-	-	-
	SS.5. Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana BPS					
	5.1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	65	85	85	85	85
	5.2. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100	100	100	100	100

Lampiran 3. Rencana Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator		Satuan	Target
(1)		(2)	(3)
Tujuan I : peningkatan kualitas data statistik			
IT.1.1. Persentase Konsumen yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik		Persentase	80%
SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	IKSS.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persentase	80%
	IKSS.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persentase	80%
	IKSS.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persentase	100%
	IKSS.1.4. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi/Laporan	22
	IKSS.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi/Laporan	1
	IKSS.1.6. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei	Persen	98,06%
Tujuan II : peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik			
IT.2.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS		Persentase	80%
SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)	IKSS.2.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Pengunjung	11.000
	IKSS.2.2. Persentase Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persentase	60%
	IKSS.2.3. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persentase	80%
Tujuan III : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik			
IT.3.1. Jumlah Metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus		Metadata	10
SS.3. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	IKSS.3.1. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10
Tujuan IV : Peningkatan birokrasi yang akuntabel			

IT.1.1. Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat		Poin	58,12
SS.4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	IKSS.4.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	58,12
SS.5. Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana BPS	IKSS.5.1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80
	IKSS.5.1. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100

<https://gunungkidulkab.bps.go.id>

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
T1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	80
SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	80
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	80
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100,00
	Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	22
	Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	1
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei	Persen	98,06
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasankonsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	80
SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	Pengunjung	11.000
	Persentase Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	60
	Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	80
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10
SS3. Meningkatnya koordinasi dan	Jumlah metadata kegiatan statistik	Metadata	10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	sektoral dan khusus yang dihimpun		
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	58,12
SS4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	58,12
SS5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80
	Persentase Pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100

Lampiran 5. Pengukuran Capaian Kinerja BPS Kabupaten Gunungkidul

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T1	Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	I	0	0	0.00
				II	0	0	0.00
				III	0	0	0.00
				IV	80	96.97	120.00
SS1	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	I	0	0	0.00
				II	0	0	0.00
				III	0	0	0.00
				IV	80	96.97	120.00
		Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	I	0	0	0.00
				II	0	0	0.00
				III	0	0	0.00
				IV	80	96.97	120.00
		Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	I	0	0	0.00
				II	0	50	50.00
				III	0	100	100.00
				IV	100	100	100.00
		Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Persen	I	0	0	0.00
				II	0	0	0.00
				III	0	21	95.45
				IV	22	22	100.00
		Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	Persen	I	0	0	0.00
				II	0	0	0.00
				III	1	1	100
				IV	1	1	100.00
		Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei	Persen	I	32.05	23.81	24.28
				II	68.11	63.28	64.53
				III	85.06	87.12	88.84
				IV	98.06	98.77	100.72
T2	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	I	0	0	0.00
				II	0	0	0.00
				III	0	0	0.00
				IV	80	97.2	120.00
SS2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	Persen	I	2,750	4,752	43.2
				II	5,500	8,576	78.0
				III	8,520	12,384	112.58
				IV	11,000	20,297	120.00
		Persentase konsumen yang menggunakan data	Persen	I	0	0	0.00
				II	0	0	0.00

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	III	0	0	0.00
				IV	60	83.33	120.00
		Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS		I	0	0	0.00
				II	0	0	0.00
				III	0	0	0.00
				IV	80	94.25	117.81
T3	Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus	Metadata	I	0	0	0.00
				II	0	0	0.00
				III	0	0	0.00
				IV	10	7	70.00
SS3	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus	Metadata	I	0	0	0.00
				II	0	0	0.00
				III	0	0	0.00
				IV	10	7	70.00
T4	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	I	0	0	0.00
				II	0	0	0.00
				III	0	0	0.00
				IV	58.12	60.11	103.42
SS4	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persen	I	0	0	0.00
				II	0	0	0.00
				III	0	0	0.00
				IV	58.12	60.11	103.42
SS5	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	I	0	0	0.00
				II	0	0	0.00
				III	0	0	0.00
				IV	80	96.97	120.00
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	I	0	0	0.00
				II	0	0	0.00
				III	100	100	100
				IV	100	100	100.00

Lampiran 6. SDM BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/ DIV	S0/ DIII	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kepala BPS Kabupaten	-	-	1	-	-	-	-	1
2.	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	4	-	-	-	-	4
3.	Seksi Statistik Produksi	-	1	3	-	-	-	-	4
4.	Seksi Statistik Distribusi	-	2	2	-	-	-	-	4
5.	Seksi Statistik Sosial	-	2	2	-	-	-	-	4
6.	Seksi IPDS	-	2	-	-	-	-	-	2
7.	Seksi Nerwilis	-	1	3	-	-	-	-	4
8.	Koordinator Statistik Kecamatan	-	-	2	2	9	-	-	13
Jumlah		-	8	17	2	9	-	-	36

Lampiran 7. Kegiatan BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

No.	Kegiatan	Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran 2019												
2	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan 2019												
3	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Dan Konsumsi Tahun 2019												
4	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan (MKP) 2019												
5	Statistik Politik Keamanan												
6	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)												
7	Statistik Politik Keamanan												
8	Potensi Desa (PODES)												
9	Survei Perusahaan Peternakan RPH/TPH												
10	Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP												
11	Survei Perusahaan Kehutanan												
12	Survei Industri Besar/Sedang Tahunan												
13	Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan												
14	Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan												
15	Survei Pertrambangan, Energi, Penggalian, Captive Power dan Updating Direktori												
16	Survei Konstruksi dan Updating Direktori Perusahaan Konstruksi												
17	Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan												
18	Kerangka Sampel Area												
19	Kompilasi Data Transportasi												
20	Updating Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan												
21	Survei Harga Perdesaan												
22	Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal												
23	Survei Bidang Jasa Pariwisata												
24	Survei Paket komoditas IKK / Indeks Kemahalan Konstruksi												
25	Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah												
26	Survei Wisatawan Nusantara												
27	Penyusunan Kabupaten Dalam Angka												
28	Penyusunan Kecamatan Dalam Angka												
29	Survei Kebutuhan Data												
30	Metadata												
31	Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020												



No.	Kegiatan	Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
32	Penyusunan PDRB Tahunan Dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100												
33	Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan (SKKRT & SKLNPRT)												
34	Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan Dan Tahunan												
35	Indeks Tendensi Bisnis Dan Indeks Tendensi Konsumen (STK)												
36	Survei Penyusunan Disagregasi PMTB												

Lampiran 8. Respon Rate Survei BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Nama Survei	Target	Realisasi	Response Rate (%)
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran 2019	380	381	100,26
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan 2019	570	568	99,65
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Dan Konsumsi Tahun 2019	770	766	99,48
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan (MKP) 2019	190	190	100
Statistik Politik Keamanan	3	3	100
Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	40	39	97,50
Potensi Desa (PODES)	144	144	100
Survei Perusahaan Peternakan RPH/TPH	4	4	100
Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP	40	40	100
Survei Perusahaan Kehutanan	4	4	100
Survei Industri Besar/Sedang Tahunan	15	21	140,00
Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan	170	170	100
Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan	680	814	119,71
Survei Pertrambangan, Energi, Penggalian, Captive Power dan Updating Direktori	46	50	108,70
Survei Konstruksi dan Updating Direktori Perusahaan Konstruksi	18	20	111,11
Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan	1407	1072	76,19
Kerangka Sampel Area	2670	2670	100
Kompilasi Data Transportasi	3	3	100
Updating Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan	18	18	100
Survei Harga Pedesaan	744	744	100
Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal	2	2	100
Survei Bidang Jasa Pariwisata	233	233	100
Survei Paket komoditas IKK / Indeks Kemahalan Konstruksi	4	4	100
Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	2	2	100
Survei Wisatawan Nusantara	475	475	100
Penyusunan Kabupaten Dalam Angka	1	1	100
Penyusunan Kecamatan Dalam Angka	18	18	100
Survei Kebutuhan Data	30	30	100
Metadata	10	7	70
Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020	2473	2421	97,90
Penyusunan PDRB Tahunan Dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100	1	1	100



Nama Survei	Target	Realisasi	Response Rate (%)
Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan (SKKRT, SKLNPRT, SKSPPI)	160	160	100
Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan Dan Tahunan	1	1	100
Indeks Tendensi Bisnis Dan Indeks Tendensi Konsumen (STK)	120	120	100
Survei Penyusunan Disagregasi PMTB	98	98	100

<https://gunungkidulkab.bps.go.id>

Lampiran 9. Judul Publikasi BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

No.	Judul	Periode Terbit
1	Statistik Pertanian Kabupaten Gunungkidul 2018	Tahunan
2	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul 2018	Tahunan
3	Statistik Tanaman Pangan 2018	Tahunan
4	Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019	Tahunan
5	Analisis Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul 2019	-
6	Analisis Indeks Harga Konsumen Kabupaten Gunungkidul 2019	-
7	Gunungkidul Dalam Angka 2019	Tahunan
8	Kecamatan Panggang Dalam Angka 2019	Tahunan
9	Kecamatan Purwosari Dalam Angka 2019	Tahunan
10	Kecamatan Paliyan Dalam Angka 2019	Tahunan
11	Kecamatan Saptosari Dalam Angka 2019	Tahunan
12	Kecamatan Tepus Dalam Angka 2019	Tahunan
13	Kecamatan Tanjungsari Dalam Angka 2019	Tahunan
14	Kecamatan Rongkop Dalam Angka 2019	Tahunan
15	Kecamatan Girisubo Dalam Angka 2019	Tahunan
16	Kecamatan Semanu Dalam Angka 2019	Tahunan
17	Kecamatan Ponjong Dalam Angka 2019	Tahunan
18	Kecamatan Karangmojo Dalam Angka 2019	Tahunan
19	Kecamatan Wonosari Dalam Angka 2019	Tahunan
20	Kecamatan Playen Dalam Angka 2019	Tahunan
21	Kecamatan Patuk Dalam Angka 2019	Tahunan
22	Kecamatan Gedangsari Dalam Angka 2019	Tahunan
23	Kecamatan Nglipar Dalam Angka 2019	Tahunan
24	Kecamatan Ngawen Dalam Angka 2019	Tahunan
25	Kecamatan Semin Dalam Angka 2019	Tahunan
26	Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul 2019	Tahunan
27	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunungkidul 2014 – 2018	Tahunan
28	PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Gunungkidul 2014 – 2018	Tahunan
29	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul 2018	Tahunan
30	Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul 2019	-

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
Jl. Pemuda 19A Baleharjo Wonosari 55811,
Telp : (0274) 394180, Fax : (0274) 394181,
Email : bps3403@bps.go.id